

Meningkatkan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas: Wawasan dari Pengalaman Terkait Investasi Berbasis Lahan Perangkat Alat

Desember 2025

Ucapan Terima Kasih: Perangkat ini ditulis oleh Anna Bulman, Thierry Berger, dan Rachael Knight.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bennett Jarvis dan Elisabetta Marzo atas tinjauan-tinjauan kepustakaan yang dihasilkan, dan kepada Grace Brennan untuk dukungan riset yang sangat berharga. Kami juga berterima kasih kepada Akhila Kolisetty, Alda Salomao, Elisa Scalise, Emily Polack, Hansika Agrawal, Lara Wallis, Martina Umutoni Gasana, Nathaniah Jacobs, Omaira Bolanos, Philippine Sutz, Rebecca Iwerks, dan Ruth Nzembi atas waktu yang telah diluangkan dan keahlian yang diberikan dalam meninjau dan memperluas beragam versi dari perangkat ini.

ALIGN: Advancing Land-based Investment Governance

ALIGN mendukung pemerintah, masyarakat sipil, komunitas dan masyarakat, serta aktor-aktor terkait lainnya dalam memperkuat tata kelola investasi berbasis lahan. Proyek ini diimplementasikan oleh konsorsium yang dipimpin oleh International Institute for Environment and Development (IIED), Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), dan Namati, dan didanai oleh UK International Development dari pemerintah Inggris. Materi ini telah diproduksi sebagai bagian dari ALIGN oleh CCSI dan IIED, namun, pandangan yang diungkapkan belum tentu mencerminkan pandangan atau kebijakan resmi mitra ALIGN atau pemerintah Inggris.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	3
Alat 1. Mengidentifikasi dan Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Perempuan dalam Partisipasi yang Bermakna dalam Keterlibatan Komunitas	10
Alat 2. Daftar Periksa Perencanaan Keterlibatan Komunitas yang Inklusif bagi Perempuan	29
Alat 3. Sumber Perangkat Hukum dan Praktik-praktik Baik untuk Inklusi Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas	40
Bibliografi	47
Catatan Kaki.....	53

Pendahuluan

Informasi dalam perangkat ini awalnya berasal dari wawasan yang diperoleh melalui Fasilitas Dukungan Teknis dari inisiatif Advancing Land-Based Investment Governance (**ALIGN**). Sebagai bagian dari pekerjaan tersebut, kami mengumpulkan pengalaman dan rekomendasi utama dari literatur (yang sebagian besar) berbahasa Inggris, dari anggota tim ALIGN, dan para penilai yang ahli tentang hambatan yang dihadapi perempuan untuk inklusi yang bermakna dalam keterlibatan komunitas dalam konteks investasi berbasis lahan, serta strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kami mencatat bahwa informasi ini belum pernah dikumpulkan di satu tempat dengan cara yang mudah dipahami, praktis, dan pragmatis. Perangkat ini bertujuan untuk melakukan hal tersebut.

Perangkat ini terdiri dari tiga alat di bawah ini:

Alat 1. Mengidentifikasi dan Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Perempuan dalam Partisipasi yang Bermakna pada Keterlibatan mereka dalam Komunitas

Alat 2. Daftar Periksa Perencanaan Keterlibatan Komunitas yang Inklusif bagi Perempuan

Alat 3. Sumber Perangkat Hukum dan Praktik-praktik Baik untuk Inklusi Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas

Masing-masing perangkat ini juga tersedia dalam bentuk PDF terpisah yang dapat Anda unduh di halaman utama [Meningkatkan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas: Wawasan dari Pengalaman Terkait Investasi Berbasis Lahan](#).¹ Daftar periksa juga tersedia untuk diunduh sebagai dokumen Microsoft Word sehingga Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya dengan konteks lokal Anda dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Selain bahasa Inggris, dokumen-dokumen tersebut tersedia dalam terjemahan informal bahasa Prancis, Bahasa Indonesia, dan Portugis.

Kami tidak secara khusus membatasi cakupan perangkat ini pada subkelompok perempuan tertentu. Namun, perangkat ini lebih berorientasi pada perempuan yang tinggal di daerah pedesaan, di mana investasi berbasis lahan biasanya terjadi. Kami mengakui bahwa mengacu secara umum pada perempuan mengaburkan perbedaan status politik dan hukum subkelompok perempuan (berdasarkan faktor-faktor seperti status penduduk asli) dan cara pandang mereka, dan kami telah berupaya untuk menyoroti nuansa-nuansa tersebut di beberapa bagian. Namun, nuansa-nuansa ini akan lebih baik diuraikan dalam adaptasi perangkat ini yang spesifik pada konteks. Meskipun perangkat ini dirancang untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan, banyak hambatan dan strategi-strategi guna mengatasi hambatan tersebut yang relevan dengan upaya yang dilakukan bersama berbagai kelompok yang terpinggirkan, termasuk peternak, kaum muda, migran, penyandang disabilitas, dan individu LGBTQ+, di antaranya.

Sebuah catatan tentang pemilihan kata

Dalam perangkat ini, kami menggunakan istilah-istilah:

Komunitas diartikan sebagai sekelompok individu, keluarga, dan rumah tangga yang secara kolektif tinggal di dalam atau memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan wilayah tertentu dengan batas-batas yang dapat didefinisikan dan diatur oleh seperangkat struktur pemerintahan adat, adat istiadat, atau struktur negara yang sama. Kami mengakui status hukum yang berbeda dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Keturunan Afrika sebagai kelompok yang berbeda dan telah berupaya untuk mengakui nuansa tersebut sedapat mungkin, sambil menggunakan istilah komunitas sebagai sebutan jika sesuai.

Keterlibatan mengacu pada berbagai interaksi (termasuk pertemuan kelompok formal, percakapan informal dengan individu, dan pertukaran informasi melalui cara lain seperti pesan elektronik atau audio) yang seharusnya dilakukan oleh suatu komunitas dengan pihak luar sepanjang siklus hidup investasi berbasis lahan—untuk konteksnya, lihat siklus hidup investasi pertanian pada **Gambar 1**. Ini mencakup semua contoh keterlibatan komunitas oleh pihak luar dalam "proses membangun hubungan berkelanjutan dengan komunitas," termasuk namun tidak terbatas pada "pembangunan kapasitas komunitas, penyadartahuan, dan pendidikan; penilaian dampak sosial dan kinerja sosial; negosiasi, konsultasi, dan pembuatan kesepakatan komunitas; dan memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC)" serta desain dan implementasi mekanisme pengaduan. Meskipun panduan ini berfokus pada interaksi

komunitas-pihak luar dalam konteks investasi berbasis lahan, panduan ini mungkin lebih luas penerapannya pada keadaan lain dan berbagai sektor di mana pihak luar berupaya untuk terlibat dengan komunitas lokal.

Interseksionalitas digunakan sebagai kata untuk menggambarkan sifat saling terkait dari kategori-kategori sosial seperti ras, kelas, dan gender sebagaimana diterapkan pada individu atau kelompok tertentu—khususnya, bagaimana kategori-kategori ini menciptakan sistem diskriminasi atau kerugian yang tumpang tindih dan saling bergantung.

Investor mencakup seluruh kalangan elit lokal, nasional, atau internasional; perusahaan; pengambil keputusan bisnis; dan pemodal proyek yang mendukung setiap investasi, bisnis, inisiatif, atau proyek berbasis lahan yang berdampak pada masyarakat. Pemerintah sendiri seringkali merupakan investor langsung, pemegang saham, atau pemilik investasi. Istilah investor juga berlaku untuk pengusaha lokal, termasuk mereka yang mungkin beroperasi secara ilegal atau tanpa izin. Pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai jenis investor yang terlibat dalam investasi berbasis lahan tidak diperlukan untuk panduan ini, tetapi kami menyoroti keberadaan analisis tersebut, yang sangat relevan untuk mengubah perilaku.²

Partisipasi yang bermakna di mana Perempuan dapat:³



1. sepenuhnya **HADIR** dalam acara-acara pelibatan komunitas, termasuk memahami isi dari acara pelibatan tersebut dan menghadiri rapat-rapat dalam jumlah besar, dan
2. memiliki **SUARA** untuk bersuara (melalui cara-cara yang terasa nyaman bagi mereka), untuk didengarkan, dan agar ide-ide, pendapat dan kepentingan mereka dapat dipertimbangkan, dan
3. memiliki **KEKUATAN** untuk mempengaruhi pengambilan keputusan komunitas dan memainkan peran dalam pelibatan-pelibatan komunitas-pihak luar, seperti dalam konsultasi dan negosiasi.

Istilah **pihak luar** merujuk pada orang-orang yang bukan anggota komunitas. Dalam konteks investasi berbasis lahan, ini termasuk pejabat pemerintah, perwakilan perusahaan, staf organisasi nonpemerintah (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (KPU) lokal, serta para profesional dan konsultan yang dipekerjakan oleh aktor-aktor tersebut.

Perempuan mencakup mereka yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang sudah memikul tanggung jawab rumah tangga yang terkait dengan penggunaan lahan.

Apa yang dimaksud dengan investasi berbasis lahan, dan apa dampak yang ditimbulkannya pada Masyarakat Adat dan komunitas lokal?ⁱ

Pemerintah di seluruh dunia terus memberikan lahan luas kepada investor nasional dan asing untuk usaha-usaha bidang agroindustri, penebangan kayu, pertambangan, energi alternatif, dan pariwisata. Seringkali, Masyarakat Adat dan komunitas lokal tinggal di lahan-lahan ini dan memiliki hak atas lahan tersebut. Dampak positif dari investasi sendiri dapat mencakup peningkatan infrastruktur (seperti jalan, pasokan air, pasokan listrik, menara seluler, sekolah, rumah sakit), lapangan kerja bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, sewa tahunan yang dibayarkan kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal, akses ke pasar dan layanan, dan manfaat lain yang mungkin dinegosiasikan oleh setiap kelompok yang terkena dampak. Namun, manfaat yang dijanjikan mungkin tidak terwujud, dan investasi tersebut dapat membawa berbagai dampak negatif bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang terkena dampak, termasuk:

- Udara, tanah, dan air dapat tercemar, dan hewan serta tumbuhan dapat terancam punah.
- Masyarakat Adat dan komunitas lokal dapat kehilangan akses ke hutan, sumber air, lahan penggembalaan, area perikanan, dan hak jalan yang diperlukan untuk mata pencaharian, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan mereka.
- Masyarakat Adat dan komunitas lokal mungkin ditekan atau dipaksa untuk pindah dari tanah mereka.
- Jalan raya dapat menyebabkan polusi atau penggunaan truk berat dapat membahayakan anak-anak.

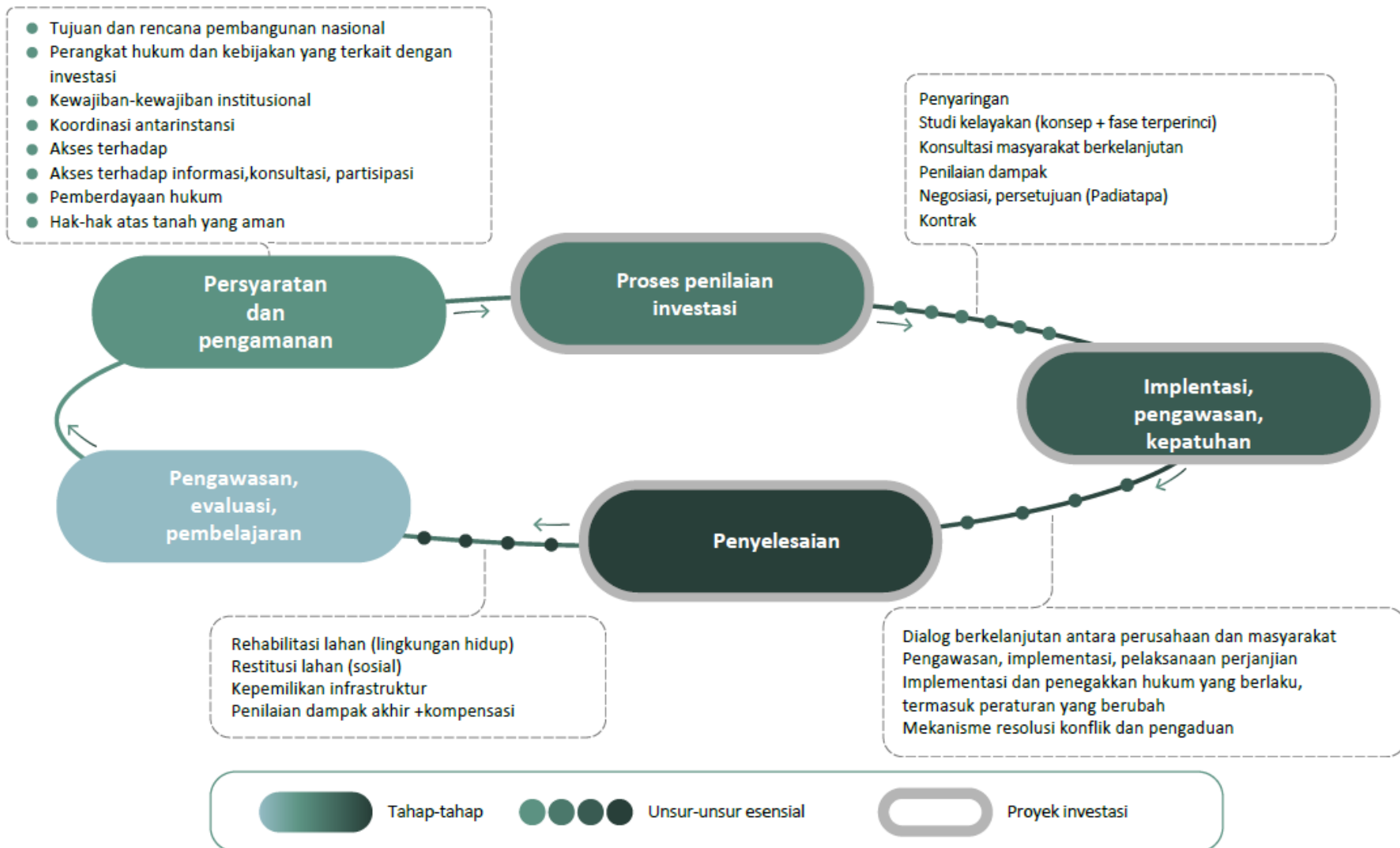
ⁱ Kami mengakui status hukum Masyarakat Adat dan Masyarakat Keturunan Afrika sebagai kelompok yang berbeda dan telah berupaya untuk mengakui nuansa tersebut bila memungkinkan, sambil menggunakan istilah komunitas sebagai singkatan jika sesuai.

- Listrik dan air mungkin dibawa ke lokasi investasi tetapi tidak dibagi dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal.
- Pekerja perusahaan dapat membawa kekerasan, alkohol, dan narkoba ke dalam komunitas dan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan.

Mengingat risiko-risiko tinggi yang dihadapi, penting agar Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang terdampak sepenuhnya diinformasikan tentang potensi investasi, dilibatkan secara bermakna dalam proyek investasi yang mungkin terjadi, dan kemudian diberi kesempatan untuk menolak atau memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) mereka (ini diwajibkan berdasarkan hukum internasional untuk Masyarakat Adat); beberapa negara memiliki undang-undang dan beberapa perusahaan memiliki standar yang memperluas hak ini kepada semua komunitas yang terdampak, termasuk Masyarakat Keturunan Afrika. Yang utama, sangat penting bahwa ketentuan dari setiap proyek investasi yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan antara komunitas dan pihak luar yang dicapai melalui proses negosiasi yang inklusif dan komprehensif. Kesepakatan ini harus didokumentasikan dalam kontrak tertulis yang telah ditinjau dan ditandatangani oleh semua pihak.⁴

Ada banyak tahapan yang terlibat dalam investasi berbasis lahan. Masyarakat Adat dan komunitas lokal harus dilibatkan dan dikonsultasikan di setiap fase. **Gambar 1** menggambarkan fase-fase kunci dan elemen-elemen penting dari perspektif investasi berbasis lahan yang bertanggung jawab dalam siklus hidup investasi pertanian. Investasi berbasis lahan lainnya akan memiliki elemen-elemen penting yang berbeda. Misalnya, proses penilaian investasi pertambangan juga akan melibatkan tahap eksplorasi, eksploitasi, dan penutupan serta berbagai elemen penting terkait lainnya.

Gambar 1: Sebuah daur hidup investasi pertanian



Sumber: Jesse Coleman dan Anna Bulman, Investment Frameworks and Responsible Land-Based Investments: Illustrating Points of Contact (IIED; ALIGN, forthcoming)

Investasi berbasis lahan menunjukkan adanya dampak terhadap Perempuan secara tidak proporsional

Lebih dari satu dekade penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan cenderung menanggung beban dampak negatif yang lebih besar dari investasi berbasis lahan. Misalnya, di daerah pedesaan, perempuan lebih mungkin kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup rumah tangga mereka dibandingkan laki-laki: Mereka mungkin harus berjalan lebih jauh untuk mengambil air, bekerja lebih keras untuk mengumpulkan kayu bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya untuk kebutuhan hidup rumah tangga. Perempuan juga cenderung kurang mendapat manfaat dari investasi dibandingkan laki-laki—data menunjukkan bahwa perempuan cenderung kurang mendapat pekerjaan dari proyek, kontrak layanan, dan pelatihan keterampilan, di antara dampak positif lainnya. Dan seiring perubahan dinamika komunitas sebagai akibat dari investasi, perempuan mungkin menderita peningkatan kekerasan berbasis gender—baik di dalam keluarga mereka maupun oleh pekerja yang terkait dengan investasi tersebut.⁵

Salah satu alasan mengapa perempuan lokal mengalami dampak negatif yang lebih besar dari investasi dibandingkan laki-laki adalah karena mereka cenderung dikecualikan dari keterlibatan komunitas yang penting. Untuk memastikan hak dan kepentingan perempuan dilindungi selama keterlibatan komunitas dengan pihak luar, perubahan sistemik yang transformatif di bidang sosial, budaya, hukum, dan kelembagaan mungkin diperlukan. Seringkali, pemerintah, investor, dan aktor luar lainnya berupaya memastikan bahwa perempuan hadir dalam konsultasi komunitas atau pertemuan Padiatapa (agar sekedar "memenuhi persyaratan" "inklusi gender"), padahal sebenarnya perempuan yang hadir tidak bersuara, atau dibungkam ketika mereka berbicara, atau ide dan kekhawatiran mereka diabaikan dalam keputusan akhir komunitas.⁶ **Gambar 2** menyoroti sejumlah nuansa beragam elemen kunci dari partisipasi perempuan:

Gambar 2: Contoh hasil-hasil dari kegiatan pelibatan komunitas dalam kontinum hak-hak perempuan⁷

Paling eksklusif	←----->			Paling inklusif
Perempuan tidak menghadiri dan tidak terwakili dalam kegiatan-kegiatan pelibatan.	Sejumlah kecil perempuan dari kalangan elit menghadiri kegiatan pelibatan namun tanpa ada pengaruh terhadap penentuan agenda atau kekuasaan untuk membuat keputusan.	Beberapa perempuan dari kalangan elit dan perempuan lainnya menghadiri kegiatan pelibatan dan memiliki sedikit pengaruh terhadap penentuan agenda tapi tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan.	Perempuan dari seluruh latar belakang berpartisipasi dalam kegiatan pelibatan dan memiliki pengaruh dalam penentuan agenda tapi tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan.	Perempuan dari seluruh latar belakang secara bermakna berpartisipasi dalam kegiatan pelibatan dalam jumlah yang mendekati atau sama dengan jumlah laki-laki, memengaruhi penentuan agenda, memainkan peran aktif dalam pengambilan keputusan komunitas yang sebagai hasilnya hak-hak serta kepentingan mereka dilindungi.

Partisipasi Perempuan yang bermakna dalam kegiatan pelibatan komunitas tentang investasi yang bertanggung jawab dan sukses

Dari sisi positif, keterlibatan komunitas dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mendukung perempuan dalam berbagi kearifan mereka dan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk kepentingan komunitas secara keseluruhan. Pemerintah dan investor sama-sama memiliki kepentingan untuk secara bermakna mengikutsertakan perempuan dalam keterlibatan komunitas, karena dengan demikian:

1. **Mematuhi kewajiban hukum (negara) dan tanggung jawab (investor).** Partisipasi perempuan yang bermakna merupakan persyaratan hukum dan elemen inti dari praktik baik internasional. Semakin banyaknya hukum dan standar internasional, regional, dan domestik mengenai investasi berbasis lahan mengharuskan negara dan investor untuk memperhatikan bagaimana pemerintah dan investor mengamankan dan menggunakan lahan serta sumber daya alam lokal. Konsumen juga semakin menuntut hal ini. Banyak dari peraturan-peraturan tersebut mencakup bagian khusus yang mensyaratkan perlindungan hak-hak perempuan dan partisipasi perempuan dalam interaksi dan negosiasi dengan pihak luar komunitas. **Perangkat 3** merangkum beberapa hukum dan standar tersebut.
2. **Lebih mungkin untuk meningkatkan hasil pembangunan lokal (seperti pemberantasan kemiskinan dan ketahanan pangan) dengan meningkatkan keamanan kepemilikan lahan masyarakat dan melindungi beragam strategi mata pencaharian.** Bukti menunjukkan bahwa hasil yang baik bagi perempuan berkorelasi dengan hasil yang baik bagi Masyarakat.⁸ Hal ini sebagian disebabkan karena perempuan sering bertanggung jawab untuk menanam bahan makanan yang dibutuhkan untuk memastikan ketahanan pangan rumah tangga⁹ dan cenderung mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan ketahanan pangan tersebut.¹⁰ Perempuan juga terutama bertanggung jawab untuk mengumpulkan air untuk konsumsi rumah tangga dan produk hutan nonkayu, obat-obatan, makanan liar, dan jerami serta bahan bangunan lainnya dari lahan umum masyarakat seperti lahan basah, hutan, dan padang rumput.¹¹ Namun, pejabat pemerintah dan pemimpin tradisional sering melihat lahan umum ini sebagai lahan yang tersedia dan mengalokasikannya kepada investor.

Jika perempuan tidak hadir sepanjang proses keterlibatan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana area publik dan sumber daya bersama adalah sangat penting bagi kelangsungan hidup rumah tangga, maka masyarakat dapat kehilangan akses ke area tersebut, sehingga dapat memiskinkan keluarga. Demikian juga, karena lahan digunakan dengan cara yang berbeda-beda mengikuti mata pencahariannya (misalnya, petani, peternak, nelayan), mengecualikan perempuan dan kelompok minoritas dari proses keterlibatan masyarakat dapat berarti bahwa penggunaan lahan, area, atau strategi pengelolaan tertentu akan hilang akibat investasi. Sebaliknya, ketika perempuan dilibatkan secara bermakna dalam kegiatan pelibatan, maka pengetahuan dan ide-ide mereka yang kaya dapat menciptakan hasil yang meningkatkan taraf kehidupan dan hasil dari pembangunan bagi komunitas mereka.

3. **Lebih mungkin untuk memperluas keberhasilan secara keseluruhan dan keberlanjutan dari sebuah investasi.** Keikutsertaan Perempuan dapat mencapai ini semua dengan cara:
 - Memberikan wawasan yang unik tentang lahan yang akan diberikan kepada proyek investasi
 - Menawarkan solusi-solusi berorientasi masa depan dan gagasan-gagasan yang mungkin bisa sangat membantu selama kegiatan penilaian dan perancangan proyek di awal, dan
 - Mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi muncul di kemudian hari dan dampak-dampak negatif, lalu melakukan pemecahan masalah sebagai upaya pencegahan yang proaktif.

Kegagalan dalam melibatkan perempuan lokal secara bermakna dalam perencanaan proyek dapat menyebabkan investor gagal untuk sepenuhnya menilai dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko proyek; hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kemungkinan konflik antara masyarakat dan investor, yang telah terbukti berdampak negatif pada keuntungan investasi.²⁰ Lebih lanjut, kegagalan dalam melibatkan perempuan dalam keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan biaya yang besar dan menyebabkan kerusakan reputasi karena investor yang tidak mematuhi hukum dan standar yang berlaku dapat berhadapan dengan upaya litigasi lokal atau bahkan lintas batas wilayah¹².

Untuk siapakah alat ini, dan bagaimana menggunakannya

Kami menyusun alat panduan ini untuk pejabat pemerintah, perwakilan perusahaan, staf LSM dan organisasi masyarakat sipil lokal, serta para profesional dan konsultan yang dipekerjakan oleh para pihak tersebut yang mungkin tidak mendapatkan pelatihan atau memiliki pengalaman yang luas tentang cara terbaik untuk

memastikan partisipasi perempuan yang bermakna dalam keterlibatan komunitas. Kami merancang sumber daya ini dengan tujuan agar sangat membantu dalam mengatur dan memfasilitasi keterlibatan komunitas, yang sering kali (tetapi tidak selalu) berbentuk pertemuan.

Alat 1 merangkum hambatan utama yang dihadapi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan komunitas dan menyajikan strategi praktis dan konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Anda dapat menelusuri Alat 1 dari awal hingga akhir atau menggunakannya sebagai alat diagnostik dengan membaca daftar isi untuk melihat hambatan-hambatan utama—mengidentifikasi hambatan yang Anda hadapi dalam kerja lapangan Anda dan langsung menuju bagian alat tersebut untuk menemukan daftar strategi yang disarankan guna mengatasinya. Alat 1 terutama didasarkan pada kerja lapangan yang dilakukan di Afrika dan Asia.ⁱⁱ Di beberapa bagian, alat ini menyertakan contoh spesifik negara tentang bagaimana strategi ini berhasil diimplementasikan.

Pengguna dapat memilih dan memilah strategi demi menemukan gagasan-gagasan yang menurut mereka layak dicoba—dan yang sesuai dengan anggaran mereka—dalam konteks mereka yang spesifik.

Alat 2 Ini adalah daftar periksa yang menerjemahkan strategi yang diuraikan dalam Alat 1 ke dalam instrumen yang mudah disesuaikan dan dapat secara langsung dan mudah memberikan informasi untuk kerja lapangan. Alat 2 juga tersedia dalam dokumen *Word* terpisah untuk tujuan ini. Namun, guna memastikan alat ini dapat bermanfaat dalam berbagai konteks, alat ini memberikan gambaran yang sangat umum tentang seperti apakah partisipasi perempuan yang bermakna dalam kegiatan pelibatan komunitas: **Pengguna harus selalu menganalisis secara kritis konteks spesifik di tempat kerja lapangan berlangsung dan menyesuaikan strategi yang disarankan dengan konteks yang berlaku di tempat tersebut.** Hal ini bisa jadi akan melibatkan penghapusan strategi, penambahan strategi, dan perubahan kata-kata yang digunakan.

Alat 3 Dokumen ini menjabarkan prinsip-prinsip utama serta sumber-sumber peraturan dan praktik-praktik baik terkait inklusi perempuan dalam keterlibatan komunitas. Kami bermaksud agar dokumen ini dimanfaatkan sebagai referensi utama bagi mereka yang ingin memahami atau perlu menunjukkan bahwa inklusi perempuan yang bermakna dalam keterlibatan komunitas merupakan kewajiban pemerintah yang telah diatur dan merupakan tanggung jawab investor.

Terakhir, perlu dicatat bahwa kami merancang perangkat ini sebagai sintesis dari pengalaman para advokat global dalam memastikan partisipasi perempuan yang bermakna dalam pengambilan keputusan terkait investasi berbasis lahan. Alat ini dimaksudkan untuk melengkapi banyak sumber daya mendalam yang sudah ada tentang topik yang lebih luas. Daftar Pustaka menyajikan sejumlah panduan praktis utama.

Catatan kaki untuk bab Pendahuluan dapat ditemukan di bagian akhir dari alat panduan yang telah dipadatkan.

ⁱⁱ Kami mencatat adanya bias terhadap sumber daya berbahasa Inggris, yang memengaruhi beragam contoh negara yang diteliti. Beberapa literatur yang ditinjau mengambil pengalaman yang dipelajari di wilayah lain, seperti Amerika Latin dan Pasifik, tetapi sebagian besar—serta fasilitas dukungan teknis ALIGN—berfokus pada pengalaman di Afrika berbahasa Inggris dan Asia Tenggara.

Alat 1. Mengidentifikasi dan Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Perempuan dalam Partisipasi yang Bermakna dalam Keterlibatan Komunitas

Bagaimana cara menggunakan Alat 1

Alat ini adalah bagian dari [Alat Peningkatan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas](#).ⁱⁱⁱ Informasi tentang penggunaan kosa kata dan konteks dapat ditemukan di Alat Pendahuluan, tetapi sebagai ringkasan, jenis keterlibatan komunitas terkait investasi berbasis lahan yang mungkin bermanfaat bagi Alat 1 meliputi:

- Membangun hubungan yang berkelanjutan
- Peningkatan kapasitas, kesadaran, dan pendidikan
- Konsultasi
- Penilaian dampak dan kinerja sosial
- Negosiasi
- Pembuatan perjanjian
- Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan/Padiatapa, serta
- Desain dan implementasi mekanisme pengaduan

Alat 1 didesain untuk:

- Meningkatkan kesadaran akan fakta bahwa perempuan umumnya dikecualikan dari partisipasi yang bermakna dalam keterlibatan komunitas dikarenakan oleh hambatan langsung atau pun tidak langsung, dan bahwa pengecualian ini bisa tetap terjadi bahkan ketika ada perempuan yang hadir secara fisik di pertemuan atau kegiatan pelibatan lainnya.
- Berfungsi sebagai alat diagnostik bagi orang-orang yang terlibat dengan komunitas tetapi mendapati bahwa perempuan tidak turut berpartisipasi secara bermakna. Anda dapat menyaring hambatan-hambatan yang dijabarkan untuk melihat apakah ada yang terjadi dalam situasi Anda, dan kemudian beralih ke strategi yang sesuai untuk melihat apakah ada yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan Anda.

Yang bisa terjadi dengan cara:

- Menjelaskan hambatan-hambatan yang ada dan penyebab timbulnya hambatan-hambatan tersebut
- Menentukan strategi-strategi demi mengatasi hambatan dan penyebabnya, dan
- Menunjukkan contoh negara-negara di mana terdapat strategi-strategi yang berhasil diterapkan.

Hambatan-hambatan dan strategi yang terkait dengannya dikelompokkan menjadi:

1. Penyebab timbulnya hambatan-hambatan, dan
2. Hambatan-hambatan spesifik yang mengecualikan perempuan.

Partisipasi yang bermakna adalah ketika perempuan **HADIR**, memiliki **SUARA**, dan memiliki **KEKUATAN** untuk memengaruhi pengambilan keputusan komunitas. Kategori-kategori ini saling berkaitan. Untuk memiliki suara, perempuan harus hadir. Agar dapat memiliki kekuatan, perempuan harus hadir dan memiliki suara. Kami berupaya menunjukkan bagaimana hambatan-hambatan spesifik dapat memengaruhi kehadiran, suara, dan kekuasaan dengan menempatkan ikon-ikon berikut yang paling sesuai dengan hambatan-hambatan spesifik tersebut:

ⁱⁱⁱ Laman tentang alat: https://ccsi.columbia.edu/content/women_participation_toolkit.



Kehadiran



Suara



Kekuasaan

Harap dicatat bahwa meskipun setiap **strategi** hanya tercantum sekali dalam Alat 1, banyak dari strategi-strategi ini yang relevan dalam kaitannya dengan berbagai hambatan. Oleh karena itu, strategi-strategi tersebut telah dikumpulkan dan diuraikan dalam Alat 2 dalam daftar periksa terpisah, yang dapat diambil dari Alat, disesuaikan dengan konteks lokal, dan digunakan saat merencanakan dan melakukan kegiatan, termasuk pertemuan komunitas.

Demi kemudahan penggunaannya, semua telah dikelompokkan ke dalam judul subjek sehingga pengguna dapat langsung membuka bagian tantangan tertentu yang mereka hadapi dan menemukan strategi untuk mengatasinya. Kami mendorong pengguna untuk merenungkan secara mendalam norma dan praktik budaya, membangun gambaran lengkap tentang dinamika kekuatan yang terjadi, mencari keterkaitan antar hambatan, dan merancang strategi yang dapat diterapkan dan dapat berdampak pada berbagai situasi.

Navigasi – Daftar Penyebab dan Hambatan Spesifik

1. Penyebab mendasar dari hambatan-hambatan yang perempuan hadapi dan strategi-strategi untuk mengatasinya..... 12
 - Penyebab: Norma & praktik sosiobudaya dan kurangnya mandat hukum terkait pelibatan perempuan 12
 - Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut akan kehilangan kuasa jika perempuan meraih kekuasaan13
 - Penyebab: Pengecualian terkait dengan kelangkaan tanah, air dan sumber daya alam ... **Error! Bookmark not defined.**
2. Hambatan-hambatan spesifik yang mengecualikan perempuan dari berpartisipasi bermakna dalam keterlibatan komunitas dan strategi-strategi untuk mengatasinya 15
 - Hambatan: Waktu dan tempat pertemuan yang dapat mengecualikan perempuan 15
 - Hambatan: Perempuan mungkin tidak tahu bahwa ada pertemuan atau tidak dapat akses terhadap informasi tentang mengapa adalah penting bagi mereka untuk menghadiri pertemuan tersebut ... **Error! Bookmark not defined.**
 - Hambatan: Perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa atau sebaiknya tidak menghadiri pertemuan tentang tanah 18
 - Hambatan: Untuk menghadiri pertemuan mungkin tidak aman bagi perempuan.....**Error! Bookmark not defined.**
 - Hambatan: Interseksionalitas bisa jadi membuat semakin sulit bagi perempuan tertentu untuk berpartisipasi **Error! Bookmark not defined.**
 - Hambatan: Perempuan mungkin merasa takut, tidak nyaman, atau tidak diizinkan untuk berbicara di depan laki-laki.....**Error! Bookmark not defined.**
 - Hambatan: Perempuan tidak didengarkan oleh laki-laki, yang meremehkan keahlian mereka tentang hal-hal terkait tanah dan sumber daya alam.....**Error! Bookmark not defined.**
 - Hambatan: Laki-laki diandalkan sebagai pihak yang mewakili perempuan tetapi tidak sebenarnya mewakili kepentingan perempuan, menyisakan kesempatan yang sedikit bagi perempuan untuk berbagi tentang pendapat dan perspektifnya**Error! Bookmark not defined.**
 - Hambatan: Selama pertemuan, para fasilitator tidak menanyakan kepada perempuan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, atau tidak bertanya sama sekali, sebagai hasil adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prioritas perempuan dan cara bagaimana sebuah proyek dapat berdampak bagi kehidupan perempuan **Error! Bookmark not defined.**

Hambatan: Laki-laki mengambil keputusan akhir atas nama komunitas **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Kotak

Kotak 1: Ketegangan yang dapat timbul antara hukum adat dan hukum hak asasi manusia	12
Kotak 2: Risiko-risiko terkait dengan kuota	19
Kotak 3: Pentingnya pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut	26

1. Penyebab mendasar dari hambatan-hambatan yang perempuan hadapi dan strategi-strategi untuk mengatasinya

Penyebab: Norma & praktik sosial budaya dan kurangnya mandat hukum terkait pelibatan perempuan

Dalam banyak konteks, norma dan praktik sosiobudaya menghambat partisipasi perempuan yang bermakna dalam keterlibatan komunitas. Praktik sosiobudaya meliputi nilai-nilai, norma, kepercayaan, tradisi, preferensi, peran, dan perilaku, dan hal tersebut memengaruhi bagaimana individu dalam komunitas hidup serta struktur sosial dan sistem tata kelola komunitas. Praktik-praktik tersebut dapat diabadikan dalam hukum adat setempat (lihat **Kotak 1**). Semua hambatan spesifik yang diuraikan di bawah ini muncul secara langsung atau tidak langsung dari apa yang diizinkan atau diharapkan untuk dilakukan oleh perempuan oleh masyarakat di semua tingkatan—rumah tangga, komunitas, negara, wilayah, dan seterusnya.

Norma dan praktik sosiobudaya ini juga dapat tercermin secara langsung atau tidak langsung dalam hukum formal negara tersebut. Misalnya, bahasa netral gender dalam undang-undang, kebijakan, dan dokumen lainnya mungkin gagal mengatasi berbagai kerugian struktural yang dihadapi perempuan dalam mengakses tanah. Peraturan dan kebijakan juga mungkin gagal mengatasi proses administratif dalam pemerintahan yang melembagakan hambatan terhadap kemampuan perempuan untuk menuntut atau membela hak-hak hukum mereka. Undang-undang dan peraturan-peraturan¹³ yang berlaku bisa jadi tidak memiliki mandat yang mewajibkan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, sehingga mengakibatkan kurangnya mandat yang diatur hukum bahwa perempuan harus menjadi bagian dari tata kelola tanah komunitas dan keterlibatan komunitas.

Kotak 1: Ketegangan yang dapat timbul antara hukum adat dan hukum hak asasi manusia

Ketika hukum adat menetapkan bahwa kepemilikan tanah berjalan berdasarkan garis keturunan ayah (dan tidak mencakup perlindungan lokal untuk hak-hak perempuan atas tanah), adat istiadat dapat bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, regional, dan domestik yang melindungi hak-hak perempuan (lihat Alat 3 untuk sumber hukum dan praktik terbaik yang utama).

Salah satu cara untuk mengatasi ketegangan ini adalah dengan mengakui bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang statis. Hukum adat seringkali tidak tertulis, dan sifat dasarnya adalah dinamis serta berkembang seiring berjalannya waktu. Sama seperti bagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengalami beragam perkembangan sejalan dengan hukum konstitusional dan standar hak asasi manusia di banyak negara, demikian pula hukum adat dapat dikembangkan untuk mengakui kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan—yang sudah menjadi persyaratan di banyak negara.¹⁴ Tim proyek ini ingin bekerja sama dengan para pemimpin dan anggota komunitas untuk mengatasi kontradiksi antara hukum adat dan hukum nasional serta internasional: pendidikan, berbagi pengalaman, dan debat—semua peluang yang diberikan oleh keterlibatan komunitas terkait investasi berbasis lahan—merupakan peluang dinamis bagi komunitas untuk secara kritis merefleksikan tradisi mereka dan menyesuaikannya agar berkembang sesuai dengan konteks dan waktu saat ini.

Strategi-strategi

- Tunjuk seorang konsultan gender untuk bergabung ke dalam tim penugasan. Konsultan tersebut akan bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi terkait gender, serta memastikan setiap anggota tim terlibat dalam strategi tersebut. Langkah pertama dapat berupa menanyakan kepada beberapa perempuan terpilih tentang masalah apa yang mungkin mereka hadapi. Pilih seseorang yang memiliki pengalaman yang signifikan dalam hal inklusivitas gender di tingkat komunitas di wilayah tempat Anda akan bekerja. Jika memungkinkan, pilih seseorang yang benar-benar memahami budaya dan bahasa wilayah tersebut, serta dinamika kekuasaan dan pengecualian di tingkat desa. Konsultan harus diberi wewenang untuk membuat keputusan yang relevan dan menerapkan tindakan yang diperlukan. Jika tidak ada anggaran untuk konsultan gender, pertimbangkan untuk mempekerjakan anggota tim lapangan dengan pengalaman dan pengetahuan ini dan jadikan ini salah satu tanggung jawabnya.
- Dalam bekerja sama dengan masyarakat, **identifikasi dan bangun hubungan kerja dengan dua orang warga setempat** (seorang laki-laki dan seorang wanita) yang akan bertanggung jawab untuk mendukung komunikasi tim Anda dengan masyarakat. Pertimbangkan dengan cermat siapa yang akan memainkan peran ini: pilih orang-orang yang jujur, dihormati, dan dipercaya oleh masyarakat—terlepas dari status, latar belakang, atau kelompok tempat mereka berada—serta reflektif dan bijaksana tentang budaya, norma, dan dinamika masyarakat. Bisa jadi cara yang terbaik adalah memilih individu yang mewakili berbagai latar belakang sosial ekonomi, etnis, dan agama setempat untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat merasa terwakili oleh mereka. Untuk menghargai waktu mereka, pertimbangkan untuk membayar mereka dengan uang, pelatihan keterampilan, dan pulsa (kredit telepon seluler).
- **Bekerja samalah dengan sekolah-sekolah dan program-program kepemudaan untuk menanamkan sikap kesetaraan gender** pada generasi mendatang, memastikan transformasi jangka panjang.
- **Identifikasi dan membangun hubungan kerja yang baik dengan Masyarakat sipil yang relevan atau organisasi hak-hak Perempuan** yang bekerja dengan kelompok-kelompok perempuan dan kelompok yang terpinggirkan yang dapat:
 - Memberikan wawasan, saran dan dukungan
 - Mengidentifikasi kelompok-kelompok terpinggirkan
 - Memfasilitasi pertemuan-pertemuan, dan
 - Mengidentifikasi dan mobilisasi kelompok-kelompok dan jejaring Perempuan yang relevan.
- **Mintalah saran dan bimbingan dari konsultan gender, pemandu lokal, dan organisasi hak-hak perempuan** mengenai cara terbaik untuk memahami dan menavigasi norma budaya lokal dan praktik tradisional yang relevan dengan cara yang tetap menghormati norma-norma dan praktik-praktik tersebut (dan dengan demikian meminimalkan potensi mengasingkan anggota komunitas) sambil tetap mengangkat suara perempuan. Hal ini mungkin akan mencakup pendokumentasian norma dan praktik tersebut agar terlihat oleh semua pihak dan memberikan dasar untuk mulai mengarahkan perubahan konkret dan partisipatif.
- **Bangun kepercayaan dengan masyarakat, dan jangan terburu-buru.** Luangkan waktu yang dibutuhkan untuk memahami konteks, budaya, dan kepentingan berbagai anggota masyarakat. Sangat bermanfaat untuk membangun kepercayaan dengan para pemimpin masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (termasuk para pemimpin yang mungkin tidak terpilih tetapi tetap memimpin meski dengan cara lain).
- **Alokasikan sumber daya yang memadai guna menerapkan strategi-strategi yang diuraikan dalam perangkat ini.**

Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut akan kehilangan kuasa jika perempuan meraih kekuasaan

Hak-hak perempuan harus dilihat sebagai salah satu aspek dari dunia kekuasaan yang beragam, kompleks, dan saling bergantung. Kekuasaan—dan penindasan yang terlembaga—serta cara kekuasaan tersebut memengaruhi mereka yang kurang berdaya merupakan inti dari apakah perempuan berpartisipasi atau tidak dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam.¹⁵

Laki-laki sering menolak gagasan tentang hak dan wewenang perempuan karena mereka berpikir bahwa ketika perempuan memperoleh hak, wewenang, atau kekuasaan, itu berarti laki-laki harus menyerahkan kekuasaan mereka sendiri.

Di banyak masyarakat, tanah secara tradisional dipandang sebagai wilayah kekuasaan laki-laki, dan wewenang pengambilan keputusan merupakan warisan patrilineal. Budaya, praktik-praktik, atau norma-

norma semacam itu seringkali memiliki kerangka hukum di mana laki-laki secara tradisional dipandang sebagai pemilik tanah dan pengambil keputusan yang sah, sementara hak perempuan atas tanah terbatas pada penggunaan dan bukan kepemilikan. Sebagai pengguna, perempuan tidak memiliki hak pengambilan keputusan dan tidak memiliki tempat dalam pengambilan keputusan—baik dalam badan pengelolaan tanah komunitas maupun selama negosiasi dengan investor dan pihak luar lainnya.

Dalam konteks seperti itu, perempuan yang menantang norma-norma ini dapat menghadapi stigma, ejekan, dan pengucilan. Dalam beberapa kasus, laki-laki mungkin melakukan kekerasan berbasis gender ketika perempuan dalam keluarga mereka menegaskan kekuasaan secara terbuka, atau ketika mereka takut kehilangan kekuasaan sebagai akibat dari penguatan hak-hak perempuan.

Strategi-strategi

- Bersama dengan pemandu lokal dan konsultan gender, **diskusikan dan buat daftar hal-hal yang mungkin menghambat perempuan untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas**. Hal ini dapat mencakup mengungkap dan memahami prasangka masyarakat terhadap perempuan, serta bagaimana dinamika kekuasaan lokal dapat dipengaruhi oleh kebijakan, investasi, atau intervensi berbasis lahan lainnya yang diusulkan.
- **Bahas tentang ketakutan laki-laki bahwa memperkuat hak-hak Perempuan akan mengurangi kekuasaan mereka. Mobilisasi kaum laki-laki untuk menjadi juara dalam hal kesetaraan gender** dengan mengembangkan pemahaman mereka:
 - Bahwa pemberdayaan perempuan dan anak perempuan juga berarti memberdayakan laki-laki (bekerja dengan kaum muda—laki-laki muda—bisa memberikan hasil yang lebih baik dan lebih cepat karena mereka lebih terpapar dan mungkin lebih terbuka terhadap perubahan budaya).
 - Bahwa keseimbangan kekuasaan bukanlah tentang laki-laki versus perempuan, tetapi bagaimana suatu komunitas dapat berada dalam posisi terkuatnya secara keseluruhan untuk dapat terlibat dan bernegosiasi dengan pihak luar. Baik laki-laki dan perempuan akan mendapat manfaat jika perempuan juga diberi tempat di meja perundingan: Pengetahuan dan keahlian perempuan akan menambah pengetahuan dan keahlian laki-laki, memungkinkan komunitas secara keseluruhan untuk memanfaatkan gabungan kebijaksanaan dan kekuatan yang didapatkan tersebut untuk hasil yang lebih baik.
 - Tentang hubungan antara keamanan hak atas tanah bagi perempuan, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan hasil yang lebih baik bagi anak-anak dan anggota komunitas (lihat lebih lanjut di Hambatan: Perempuan tidak didengarkan oleh laki-laki, yang meremehkan keahlian mereka yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam).
 - Tentang manfaat dari upaya mengatasi kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perencanaan proyek dan pengurangan risiko.

Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- Pertemuan dengan para pemimpin adat
- Agenda khusus dalam pertemuan umum komunitas
- Pertemuan formal khusus laki-laki, termasuk para pemuda
- Diskusi informal dengan para laki-laki di tempat-tempat mereka biasa menghabiskan waktu

Beberapa pendekatan bisa berguna, seperti contoh:

- Menunjukkan hal ini melalui kegiatan pemetaan dan penilaian¹⁶
- Mencari aliansi yang bersimpati, termasuk anggota komunitas, pemimpin adat, dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial lainnya (seperti tokoh olahraga dan budaya) dan mendorong mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mendidik laki-laki dan anak laki-laki lainnya

Penyebab: Pengecualian terkait dengan kelangkaan tanah, air dan sumber daya alam

Seiring meningkatnya persaingan untuk mendapatkan lahan dan air, serta kenaikan nilai lahan, beberapa komunitas mengubah gagasan mereka tentang siapa yang termasuk dalam anggota komunitas dari sistem-sistem yang lebih fleksibel dan dapat dinegosiasikan lalu menjadi sistem yang lebih kaku dan eksklusif yang menyebabkan hilangnya hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Perempuan dan kelompok minoritas semakin tidak dianggap sebagai anggota komunitas dengan semua hak yang menyertainya. Misalnya, para janda semakin sering diusir dari rumah mereka setelah kematian suami mereka, dan anak perempuan yang belum menikah atau bercerai tidak diberikan tanah oleh saudara kandung dan orang tua mereka.

Strategi-strategi

- Bersama dengan pemandu lokal dan konsultan gender, serta melalui berbagai keterlibatan komunitas, **bangun pemahaman tentang apakah dan bagaimana kelangkaan telah memengaruhi definisi inklusi atau eksklusi komunitas dari waktu ke waktu.**
- **Jika komunitas mengidentifikasi bahwa terdapat anggota komunitas tertentu umumnya dikucilkan, pastikan mereka hadir atau terwakili dalam pertemuan** (lihat juga Hambatan: Interseksionalitas dapat mempersulit partisipasi perempuan tertentu).
- **Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan** bahwa mereka menerapkan kebijakan nasional progresif yang membahas kesetaraan gender serta melindungi dan membela hak-hak perempuan, secara umum dan dalam konteks semua keterlibatan masyarakat.

2. Hambatan-hambatan spesifik yang mengecualikan perempuan dari berpartisipasi bermakna dalam keterlibatan komunitas dan strategi-strategi untuk mengatasinya



Hambatan: Waktu dan tempat pertemuan yang dapat mengecualikan perempuan

Perempuan seringkali memikul banyak tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan yang membatasi ketersediaan mereka untuk menghadiri pertemuan, terutama pada waktu-waktu tertentu dalam satu hari atau bulan tertentu. Misalnya, selama musim tanam dan panen, banyak perempuan tidak dapat meninggalkan ladang mereka selama jam kerja.

Tempat atau lokasi penyelenggaraan acara tersebut mungkin juga sulit dijangkau oleh perempuan karena letaknya jauh, berada di tempat yang biasanya tidak boleh dimasuki perempuan, tidak mudah diakses secara fisik, atau terlalu menakutkan (lihat *Hambatan: Interseksionalitas dapat mempersulit partisipasi perempuan tertentu*).

Strategi-strategi

- **Berkonsultasi dengan perempuan dan pemimpin perempuan setempat** (mungkin dengan mengunjungi mereka di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi atau berkumpul, seperti di sumber-sumber air, pasar, dan rumah) tentang hal-hal apa yang mungkin menghalangi perempuan untuk menghadiri pertemuan atau kegiatan lainnya dan mencari informasi seperti:
 - Hari apa, jam berapa dan apa lokasi di mana paling memungkinkan bagi perempuan untuk bisa hadir?
 - Pada minggu-minggu apa saja dalam setahun sebaiknya tidak diadakan acara pertemuan, karena bertepatan dengan siklus pertanian atau acara penting lainnya.
 - Dengan cara apalagi tim fasilitasi dapat memudahkan atau meniadakan hambatan-hambatan yang ada demi kehadiran para perempuan?
 - Susun jadwal para perempuan dengan cermat untuk mengetahui kapan waktu yang tepat (misalnya, setelah sarapan dimasak, kayu bakar dikumpulkan, dan air diambil tetapi sebelum

persiapan makan malam). Jangan menjadwalkan pertemuan komunitas selama waktu menanam dan panen, kecuali jika calon peserta perempuan menyetujuinya terlebih dahulu.

- Cari tahu dukungan apa yang meningkatkan kemungkinan perempuan untuk dapat hadir, seperti menyediakan penitipan anak, transportasi, dan makanan.
- **Jadwalkan pertemuan pada hari dan waktu yang paling memungkinkan bagi perempuan untuk hadir.** Hindari menjadwalkan pertemuan pada saat perempuan sedang menyiapkan makanan keluarga atau selama waktu makan.
- **Atur penyelenggaraan pertemuan di dekat tempat tinggal komunitas lokal.** Pilih tempat pertemuan yang sentral dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh komunitas (dari segi jarak tetapi juga tidak eksklusif: gereja, masjid, atau markas politik dapat mengasingkan sebagian penduduk). Pertemuan di luar ruangan mungkin yang terbaik, asalkan ada naungan yang memadai dan tempat duduk yang sesuai. Untuk pertemuan khusus perempuan, akan sangat membantu untuk mencari tahu terlebih dahulu di mana perempuan biasanya bertemu dan berkumpul, lalu mengadakan pertemuan di sana.
- **Mengatur transportasi** untuk para wanita yang tinggal jauh dari tempat pertemuan (serta bagi penyandang disabilitas dan lansia)
- **Sediakan layanan penitipan anak.** Untuk memastikan perempuan dapat hadir dan sepenuhnya fokus, akan berguna jika ada layanan penitipan anak yang disediakan di pertemuan tersebut.

Contoh-contoh solusi di beberapa negara

Di Uganda, sebuah LSM menjawab tantangan ini dengan mengirimkan bahan-bahan mentah untuk makanan komunitas ke lokasi pertemuan, di mana bahan-bahan tersebut dimasak di tempat oleh sekelompok asisten hukum setempat, sehingga memungkinkan Perempuan-perempuan dalam komunitas tersebut untuk ikut serta dalam pertemuan saat makan siang.¹⁷

Di empat desa di Tanzania, komunitas setempat di sana mengadopsi peraturan daerah untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa. Peraturan daerah mereka menetapkan bahwa pertemuan tidak dapat diadakan kecuali setidaknya 50% perempuan dari komunitas tersebut hadir. Hal ini dicapai dengan cara menjadwalkan pertemuan pada waktu yang sesuai bagi perempuan.¹⁸



Hambatan: Perempuan mungkin tidak tahu bahwa ada pertemuan atau tidak dapat akses terhadap informasi tentang mengapa adalah penting bagi mereka untuk menghadiri pertemuan tersebut

Ada banyak alasan mengapa perempuan tidak menerima informasi tentang atau yang relevan dengan keterlibatan komunitas, termasuk:

- **Informasi hanya dibagikan kepada laki-laki.** Perempuan dan laki-laki mungkin menerima informasi melalui saluran yang berbeda: seringkali perempuan mendapatkan informasi dari perempuan lain, atau di sekolah atau pusat kesehatan, sementara laki-laki mungkin saat di kafe atau tempat tertentu tempat mereka berkumpul untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Informasi juga dapat dipasang di lokasi yang hanya dikunjungi laki-laki atau disampaikan melalui pemimpin laki-laki, yang menyampaikan informasi kepada laki-laki secara lisan.
- **Informasi dijaga ketat oleh sekelompok elit laki-laki.** Kesepakatan tanah sering kali dinegosiasikan secara rahasia oleh beberapa pemimpin laki-laki, atau dewan tetua laki-laki, dengan informasi yang sengaja dirahasiakan dari perempuan dan pihak lain. Bahkan ketika masyarakat memilih atau menyeleksi tim negosiasi, mereka mungkin tidak memiliki perwakilan perempuan dalam tim tersebut.
- **Literasi.** Anak perempuan umumnya mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih sedikit daripada anak laki-laki dan sering kali dikeluarkan dari sekolah lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau dipaksa menikah dini (kadang-kadang dipaksakan), terutama dalam konteks kemiskinan. Akibatnya, perempuan mungkin tidak sebaik laki-laki dalam membaca dan memahami informasi. Pemberitahuan rapat mungkin dipasang dalam bentuk tulisan, dan informasi yang relevan mungkin terdapat dalam dokumen yang tidak dapat dibaca oleh perempuan yang tidak melek huruf. Akibatnya, perempuan bahkan mungkin tidak mengetahui bahwa suatu rapat sedang berlangsung.



- **Kurangnya akses ke media atau pusat komunitas tempat informasi disebarluaskan.** Perempuan mungkin tidak memiliki akses ke teknologi atau platform media sosial yang menyediakan informasi, seperti radio, telepon seluler, dan komputer.

Jika perempuan tidak mengetahui bahwa ada acara, seperti pertemuan, maka mereka tidak mungkin dapat hadir.

Sekalipun perempuan mengetahui tentang suatu pertemuan yang akan diadakan dan tidak dilarang hadir oleh anggota keluarga laki-laki atau norma sosial (lihat *Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut kehilangan kekuasaan jika perempuan mendapatkan kekuasaan* dan *Hambatan: Perempuan mungkin merasa tidak dapat atau tidak seharusnya menghadiri pertemuan tentang tanah*), perempuan mungkin tetap tidak bisa hadir jika mereka tidak paham bagaimana pertemuan tersebut akan memengaruhi mereka dan mengapa kehadiran dan partisipasi mereka sangat penting—dan dibutuhkan. Perempuan umumnya menjalani kehidupan yang sangat sibuk dan menanggung beban yang tidak proporsional terkait tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan tanpa upah lainnya. Waktu luang adalah konsep yang asing bagi banyak perempuan. Jika mereka tidak memahami urgensi dan pentingnya partisipasi mereka, perempuan mungkin tidak ingin meluangkan waktu untuk pergi ke pertemuan tersebut.

Strategi-strategi

- **Terjemahkan informasi ke dalam bahasa lokal.** Bekerja samalah dengan penerjemah dan juru bahasa yang dapat Anda percayai, terutama pilih penerjemah perempuan dan orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya lokal.
- **Gunakan cara-cara kreatif yang tidak tertulis.** Contohnya, tim proyek dapat melakukan hal-hal di bawah ini:
 - Umumkan detail pertemuan di program radio lokal yang didengarkan oleh perempuan. Mintalah stasiun radio untuk menyediakan segmen singkat untuk membahas informasi yang relevan (misalnya, sesi tanya jawab antara dua pembawa acara tentang prospek kesepakatan jual-beli lahan).
 - Mengatur agar para pemimpin atau penggerak komunitas mengunjungi rumah-rumah warga, menyampaikan informasi secara lisan tentang pertemuan dan hal-hal yang relevan terkait pertemuan tersebut, menekankan perlunya partisipasi aktif perempuan, dan secara proaktif meminta kehadiran perempuan.
 - Mendorong komunikasi verbal dan dari mulut ke mulut antar perempuan.
- Saat menggunakan materi tertulis untuk mempublikasikan sebuah pertemuan, **sesuaikan desain, isi, dan lokasi tampilan agar mudah diakses dan dipahami oleh perempuan dengan tingkat literasi rendah.** Contohnya:

Desain

 - Gunakan font besar dengan gambar dan bantuan visual lain yang bisa menggambarkan penjelasan lebih lanjut.

Isi

 - Teks yang disederhanakan.
 - Informasi penting, seperti tempat, waktu pertemuan, informasi tentang topik-topik yang akan didiskusikan, apa saja pengaturan praktis yang akan dibuat agar perempuan bisa menghadiri pertemuan tersebut (misalnya, tempat penitipan anak).

Tampilan

 - Tempat-tempat public di mana perempuan berkumpul, seperti sumber-sumber air, lokasi tempat mencuci di pinggir sungai, dan pasar-pasar.
 - Buat tempat-tempat berkumpul beragam (seperti gereja, masjid, sekolah, dan puskesmas/klinik kesehatan).
 - Suatu bentuk media sosial yang biasanya dipilih digunakan oleh masyarakat setempat untuk menargetkan perempuan-perempuan yang melek huruf dan memiliki gawai (seperti WhatsApp, Signal, Telegram, dan Messenger).
- **Berikan dukungan teknologi jika diperlukan.** Ini mungkin termasuk menyediakan akses ke komputer dengan koneksi internet atau ponsel pintar untuk meninjau informasi relevan yang mungkin hanya tersedia secara daring.

- **Dukung komunitas untuk melakukan segala upaya guna memastikan para pemimpin tidak mengadakan pertemuan pribadi dan rahasia dengan investor.** Adakan diskusi komunitas terbuka mengenai masalah ini yang dirancang untuk membantu komunitas bertukar pikiran tentang strategi untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin dalam negosiasi publik.



Hambatan: Perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa atau sebaiknya tidak menghadiri pertemuan tentang tanah

Dalam masyarakat yang kepemilikan atas tanahnya bersifat patrilineal, laki-laki sering dianggap sebagai penentu tata kelola dan pengelolaan tanah dalam suatu komunitas. Akibatnya, ketika diadakan pertemuan untuk membahas keputusan terkait tanah, baik laki-laki maupun perempuan dalam komunitas tersebut mungkin berasumsi bahwa pertemuan itu hanya untuk laki-laki saja.

Bahkan di negara-negara di mana sistem hukum formal mengakui kepemilikan dan hak-hak perempuan lainnya, norma-norma lokal mungkin masih menghambat partisipasi perempuan dalam pertemuan tentang tata kelola tanah (lihat lebih lanjut tentang ketegangan ini di **Kotak 1**). Hal ini mungkin karena laki-laki mungkin enggan berbagi wewenang ini dengan perempuan (lihat lebih lanjut *Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut kehilangan kekuasaan jika perempuan mendapatkan kekuasaan*) dan karena kurangnya pengetahuan lokal tentang hak-hak perempuan atas tanah, hak-hak sipil, dan hak asasi manusia lainnya.

Terakhir, meskipun perempuan mengetahui tentang adanya suatu pertemuan dan menyadari bahwa perempuan diundang untuk hadir, seringkali hanya perempuan dari keluarga paling elit (seperti istri pemimpin tradisional) yang merasa ingin hadir atau berhak untuk hadir. Dalam kasus seperti itu, perempuan yang keluarganya tidak memiliki tanah, perempuan migran, atau perempuan dari kelompok minoritas dalam masyarakat mungkin merasa tidak diterima. Padahal, anggota masyarakat yang paling terpinggirkan seringkali adalah mereka yang paling dirugikan oleh investasi berbasis lahan.



Strategi-strategi

- **Jelaskan ke seluruh komunitas bagaimana perempuan akan secara langsung terdampak oleh hal-hal yang akan dibahas.** Jelaskan bahwa suara perempuan itu penting dan bagaimana pokok bahasan dari pertemuan tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka; oleh karena itu, mereka perlu hadir.
- **Ajarkan seluruh komunitas tentang hak-hak perempuan.** Selenggarakan pelatihan khusus bagi laki-laki agar mereka memahami mengapa kehadiran, suara, dan kekuatan perempuan dalam pertemuan komunitas itu penting dan mengapa mereka harus mengajak perempuan di rumah dan lingkungan sekitar mereka untuk menghadiri pertemuan komunitas. Alih-alih ceramah, carilah pendekatan partisipatif dan interaktif yang dimulai dengan apa yang sudah diketahui komunitas tentang hak-hak perempuan, kemudian bangunlah pengetahuan dan kesadaran dari sana.
- Jika ada, **bandingkan norma hukum konstitusional atau norma hukum domestik lainnya yang mendorong kesetaraan gender dengan norma adat yang sesuai.** Latihan ini dapat menjadi bagian dari sesi literasi hukum yang perlu diselenggarakan bagi masyarakat untuk membahas tata kelola lahan dan hak asasi manusia lingkungan dalam konteks investasi berbasis lahan.
- **Menekankan peran pemimpin tradisional sebagai pelindung anggota masyarakat dan hak-hak, martabat, serta kesetaraan yang melekat pada semua orang,** memastikan bahwa pentingnya melindungi hak dan kepentingan perempuan dirumuskan dengan cara yang menarik bagi para pemimpin dan menginspirasi mereka untuk membela hak-hak perempuan.
- **Memberikan pelatihan bagi kaum perempuan tentang hak-hak mereka**—baik hak substantif maupun hak mereka untuk berperan aktif dalam tata kelola komunitas—dan informasi relevan terkait investasi. Pelatihan tersebut dapat mencakup hukum nasional dan kerangka hukum internasional yang melindungi hak perempuan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan komunitas.
- Dengan dukungan dari pemandu lokal, konsultan, dan organisasi perempuan, **diskusikan strategi yang sesuai dengan kondisi setempat untuk memastikan bahwa perempuan hadir dalam jumlah yang tinggi dalam berbagai kegiatan.** Contoh:

- Meminta para suami untuk membawa serta istri mereka dan anggota keluarga perempuannya.
- Mendorong perempuan untuk membawa teman-temannya ke dalam pertemuan.
- Mengembangkan dari jejaring yang ada atau kelompok-kelompok perempuan yang sudah terbentuk, seperti kelompok penanam pohon dan kelompok koperasi simpan-pinjam.
- **Mendukung komunitas dalam memutuskan apakah akan menetapkan kuota dan persyaratan kuorum sendiri untuk perempuan dan kelompok marginal** (misalnya, kaum muda, penggembala, penyandang disabilitas, migran, anggota kelompok etnis atau suku minoritas, dan keluarga miskin), memastikan bahwa perempuan yang hadir mewakili semua subkelompok. Lihat **Kotak 2** untuk pertimbangan yang lebih mendalam tentang risiko yang terkait dengan kuota dan strategi-strategi dalam *Hambatan: Perempuan mungkin takut, tidak nyaman, atau tidak diizinkan untuk berbicara di depan laki-laki* untuk mengatasi risiko tersebut.
- **Mengidentifikasi dan adanya mendorong panutan yang relevan secara kontekstual serta perempuan inspiratif** untuk menyebarkan informasi dan mendorong perempuan lain untuk terlibat.

Kotak 2: Risiko-risiko yang terkait dengan kuota

Undang-undang yang mensyaratkan kuota dan persyaratan kuorum untuk kehadiran perempuan memberikan titik awal yang baik dalam hal memastikan kehadiran fisik perempuan dalam pertemuan-pertemuan, tetapi persyaratan kuota tidak bisa: 1) memastikan bahwa perempuan dipersiapkan dan diberi informasi yang memadai untuk berpartisipasi secara bermakna; dan 2) memastikan bahwa perempuan benar-benar bisa bersuara dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Dalam banyak kasus, tim lapangan, pejabat pemerintah, dan investor mungkin berupaya agar perempuan menghadiri rapat pertemuan sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan hukum (dalam bentuk kuota) bahwa ada perempuan yang terlibat, tetapi kemudian gagal memastikan bahwa perempuan benar-benar bersuara dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, perempuan mungkin datang ke pertemuan dalam jumlah besar, sehingga memenuhi kuota, tetapi perempuan yang hadir mungkin berasal dari keluarga elit, kelompok etnis dominan, penganut agama dominan, atau berpihak pada satu pemimpin (yang telah memanggil mereka untuk menghadiri pertemuan tersebut) dengan mengesampingkan mereka yang berasal dari keluarga, kelompok, agama, kesetiaan, dan kelompok minoritas lainnya yang berbeda (lihat lebih lanjut *Hambatan: Interseksionalitas dapat mempersulit perempuan tertentu untuk berpartisipasi*).



Hambatan: Untuk menghadiri pertemuan mungkin tidak aman bagi perempuan

Mungkin tidak aman bagi perempuan untuk menghadiri pertemuan atau berpartisipasi dalam kegiatan lain karena tiga alasan utama di bawah ini:

- Tergantung pada budaya dan keluarga, suami mungkin enggan membolehkan istri mereka berinteraksi dengan laki-laki lain di luar keluarga dan menolak mengizinkan mereka menghadiri pertemuan di mana laki-laki yang bukan kerabat akan hadir. Dalam kasus seperti itu, menghadiri pertemuan dapat membuat seorang wanita rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
- Jika perempuan menghadiri suatu pertemuan, berbicara di depan umum dapat menyebabkan pengucilan sosial, konflik rumah tangga, atau bahkan kekerasan, dalam beberapa kasus.
- Dalam beberapa konteks, meninggalkan rumah dan bepergian ke suatu pertemuan dapat membahayakan perempuan—terutama jika pertemuan tersebut berlangsung jauh dari rumah mereka, sehingga mereka harus menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki bermil-mil melalui area yang tidak aman. Misalnya, berjalan kaki jarak jauh melalui hutan dapat membuat perempuan rentan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual.

Kekerasan berbasis gender memiliki beragam bentuk, termasuk fisik, seksual, psikologis, dan finansial.¹⁹

Strategi-strategi

- **Mintalah saran dan bimbingan dari konsultan gender, pemandu lokal, dan organisasi hak-hak perempuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perempuan (baik karena kekerasan**

berbasis gender, konflik, atau militerisasi) jika mereka ingin berpartisipasi dalam pertemuan atau terlibat, menyampaikan pendapat, dan sekadar menegaskan kekuasaan mereka.

- Adakan pertemuan khusus untuk kaum laki-laki sedini mungkin untuk membahas isu gender secara spesifik dengan mereka dan mengetahui persepsi, hal-hal yang mengkhawatirkan bagi mereka, dan cara pandang mereka. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tokoh laki-laki yang dapat memperjuangkan agenda gender.
- **Ambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan perempuan secara proaktif.** Misalnya, pertimbangkan keamanan pilihan transportasi lokal, sarankan untuk berpasangan guna menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya. Mungkin perlu juga untuk menetapkan proses untuk mengidentifikasi kapan perempuan berisiko mengalami kekerasan dan membentuk mekanisme respons dan pengaduan yang sesuai, tidak hanya untuk partisipasi dalam pertemuan dan kegiatan lainnya, tetapi juga untuk dampak dari keputusan yang dibuat. Perlu dicatat bahwa tindakan pencegahan dapat memakan waktu dan sebaiknya dilakukan oleh para ahli (seperti LSM) yang dipekerjakan oleh tim yang terlibat.
- **Mintalah saran dari pemandu lokal Anda, perwakilan komunitas, dan organisasi hak-hak perempuan mengenai cara terbaik untuk menyusun pertemuan agar keselamatan perempuan tidak terancam.** Tergantung pada konteksnya, mungkin akan berguna bila mengadakan pertemuan di tempat-tempat lokal yang dirasa aman oleh perempuan. Pertemuan ini mungkin lebih aman jika hanya dihadiri perempuan; dalam keadaan lain, mungkin lebih aman bagi perempuan untuk memilih laki-laki yang tepercaya untuk hadir.
- Ketika tidak aman bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan komunitas, **berkreasilah dalam mengumpulkan masukan dan umpan balik dari perempuan**, dan pertimbangkan untuk memanfaatkan anggota tim perempuan untuk:
 - Mendapatkan masukan melalui telepon
 - Berkunjung dari rumah ke rumah untuk berbicara satu lawan satu
 - Bertemu dengan perempuan-perempuan di tempat mereka bekerja (contoh, di mana mereka mengumpulkan air, mencuci pakaian, menjual hasil produk pertanian)
 - Menggunakan rekaman-rekaman audio yang anonim, dan
 - Menggunakan cara lain untuk mengumpulkan umpan balik, seperti pesan teks atau pesan melalui media sosial (seperti WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger), dengan mempertimbangkan keamanan digital dan platform terenkripsi (seperti Telegram atau Signal).

Mengumpulkan masukan dari para wanita (secara anonim) ke dalam dokumen singkat atau brosur bisa jadi sesuatu yang berguna, sehingga masukan tersebut dapat dibagikan lebih luas, misalnya kepada pejabat pemerintah atau perwakilan dari calon investor.

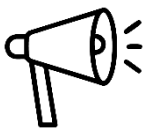
- **Bermitra dengan pemerintah setempat** untuk menyelenggarakan pertemuan dengan para perempuan di komunitas, karena suami atau kerabat laki-laki lainnya cenderung menghormati dan merasa lebih nyaman dengan pertemuan atau program yang melibatkan pemerintah.
- **Bekerja sama dengan otoritas dan pemimpin lokal untuk memastikan bahwa perempuan yang menghadiri pertemuan dan menyuarakan pendapat dilindungi dari kekerasan dan intimidasi.**



Hambatan: Interseksionalitas bisa jadi membuat semakin sulit bagi perempuan tertentu untuk berpartisipasi

Dalam konteks identitas yang tumpang tindih, setiap tantangan yang dihadapi perempuan terkait dengan menghadiri suatu pertemuan (tetapi juga menyuarakan pendapat dan memegang kekuasaan jika mereka diizinkan secara fisik untuk hadir) dapat diperburuk oleh faktor-faktor lain yang dapat semakin meminggirkan perempuan, seperti apabila mereka adalah seorang:

- Janda (misalnya, mengelola rumah tangga sendirian dengan tambahan beban dan kapasitasnya yang terbatas untuk hadir)
- Perempuan dengan disabilitas (misalnya, secara fisik tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan tanpa dibantu atau tidak dapat melihat materi-materi pertemuan ataupun mendengarkan diskusi yang berlangsung)



- Perempuan yang merupakan anggota masyarakat adat, keturunan Afrika, atau dari suku dan etnis yang berbeda atau yang minoritas (misalnya, banyak dari perempuan di suatu komunitas berasal dari budaya yang berbeda, mereka dapat mengucilkannya)
- Seorang perempuan yang bukan berasal dari komunitas tersebut (misalnya, seorang perempuan muda yang belum membangun pertemanan akrab dan mungkin tidak diundang atau takut akan pengucilan yang mungkin akan dia alami jika dia hadir atau jika ia bersuara)
- Perempuan-perempuan yang menikah atau memiliki hubungan dengan pihak luar
- Perempuan yang terlahir sebagai laki-laki namun sekarang beridentitas sebagai perempuan (misalnya, tidak setiap orang di dalam suatu komunitas dapat menerimanya sebagai seorang perempuan, namun ia juga tidak disertakan dalam forum-forum kaum laki-laki).

Interseksionalitas lainnya, termasuk status perkawinan, kelas dan kemiskinan, usia, orientasi seksual, dan status Kesehatan (misalnya, positif mengidap HIV).

Strategi-strategi

- **Berupayalah untuk memahami siapa yang dilibatkan dan siapa yang dikecualikan, dan pastikan Anda mengambil langkah-langkah untuk menjangkau semua warga komunitas** (lihat ide-ide dalam *Hambatan: Perempuan mungkin tidak mengetahui bahwa pertemuan sedang berlangsung atau tidak memiliki akses ke informasi untuk memahami mengapa kehadiran mereka penting*)
- **Berkolaborasi dengan organisasi lokal yang sudah bekerja dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan** dan mintalah bantuan mereka dalam mengidentifikasi dan melibatkan anggota komunitas yang terpinggirkan.
- **Pastikan bahwa perempuan yang sudah menikah bukanlah satu-satunya yang hadir atau terwakili dalam pertemuan**—wajibkan kehadiran dari atau atas nama janda, perempuan lajang, perempuan penyandang disabilitas, dan perempuan dari kelompok etnis atau minoritas lainnya.
- **Mengidentifikasi perempuan dengan kebutuhan khusus (seperti disabilitas fisik atau mereka yang memiliki tanggung jawab rumah tangga tambahan) dan memberikan dukungan untuk memastikan keterlibatan mereka dalam pertemuan yang diadakan.** Hal ini dapat mencakup pengaturan transportasi untuk perempuan yang tinggal jauh dari tempat pertemuan, serta individu lanjut usia dan penyandang disabilitas. Hal ini juga dapat melibatkan intervensi lain seperti penerjemahan bahasa isyarat dan penggunaan mikrofon serta penguat suara.
- Berikan perhatian dan dukungan kepada perempuan yang mungkin memiliki lingkungan keluarga yang lebih kondusif untuk menghadiri pertemuan sebagai **duta kesetaraan gender atau bahkan mewakili** mereka yang mungkin tidak dapat hadir karena hambatan-hambatan yang disebutkan di atas.



Hambatan: Perempuan mungkin merasa takut, tidak nyaman, atau tidak diizinkan untuk berbicara di depan laki-laki

Kehadiran saja tidak secara otomatis berarti bersuara atau memiliki kekuasaan: Bahkan jika perempuan menghadiri pertemuan dalam jumlah besar, mereka mungkin tidak merasa mampu atau berdaya untuk berbicara dan menyampaikan kekhawatiran serta ide-ide mereka. Dalam beberapa konteks, jika seorang perempuan berbicara dan mengutarakan pendapat yang berbeda dari anggota keluarga yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, ia mungkin menghadapi dampak sosial atau fisik dan kekerasan berbasis gender. Perempuan juga mungkin tidak merasa nyaman untuk berbeda pendapat secara terbuka dengan laki-laki. Dalam beberapa budaya, perempuan mungkin dilarang berbicara dengan laki-laki di luar keluarga mereka, termasuk dalam pertemuan komunitas. Atau perempuan mungkin tidak berbicara dalam pertemuan publik karena norma budaya bahwa laki-laki berbicara atas nama rumah tangga mereka.

Bahkan ketika hak-hak perempuan diakui dan mereka diizinkan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang relevan, perempuan harus memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbicara dan mengungkapkan minat, pendapat, dan ide-ide mereka.²⁰ Perempuan mungkin kurang percaya diri dan pengalaman dalam berbicara di depan banyak orang karena mereka belum pernah melakukannya, atau mereka takut tidak akan didengarkan (misalnya, mereka mungkin akan disela, atau ide-ide mereka mungkin diabaikan, atau mereka mungkin diejek karena kontribusi mereka).



Strategi-strategi

Bahas tentang norma-norma yang mendasar dan bangun pemahaman komunitas tentang betapa pentingnya perempuan bersuara

- Lihat strategi-strategi di bagian *Penyebab: Laki-laki mungkin saja takut akan kehilangan kuasa jika perempuan meraih kekuasaan*

Buatlah pertemuan-pertemuan sedemikian rupa yang dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersuara men

- **Memiliki agenda tetap bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya untuk menyampaikan kekhawatiran dan masukan mereka.**
- Pertimbangkan untuk mengadakan pertemuan khusus perempuan di mana **perempuan dapat memilih orang-orang yang akan mewakili pendapat dan kepentingan mereka dalam pertemuan campuran gender, dan pastikan ada perwakilan untuk berbagai subkelompok perempuan.**
- Peserta pertemuan sebaiknya dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, termasuk kelompok khusus perempuan, dan minta setiap kelompok untuk melaporkan kembali ide, pendapat, dan minat mereka kepada pertemuan yang lebih besar.
- Mendukung perempuan untuk memilih **wakil-wakil yang kuat dan berani** yang merasa nyaman berbicara atas nama mereka selama dalam pertemuan-pertemuan dengan campuran gender.
- **Lakukan upaya-upaya yang proaktif guna memastikan bahwa kaum perempuan yang hadir dalam suatu pertemuan bersuara, dengan cara:**
 - Mengamati peserta rapat untuk mencari perempuan yang wajahnya ekspresif, yang jelas-jelas sedang berpikir dan memiliki ide, lalu memanggil mereka untuk bersuara.
 - Ajaklah perempuan untuk berbicara sesering Anda mengajak laki-laki untuk berbicara, bahkan jika Anda harus sedikit mendorong seorang perempuan untuk berbagi ide-idenya.
 - Mengajukan pertanyaan yang menggali informasi yang hanya diketahui oleh perempuan, membutuhkan partisipasi verbal dari perempuan, dan menampilkan pengetahuan serta keahlian mereka.
- Temukan cara-cara kreatif untuk **mengumpulkan saran/pendapat/kekhawatiran perempuan**—lihat ide-ide dalam bagian *Hambatan: Mungkin tidak aman bagi perempuan untuk menghadiri pertemuan* di atas, termasuk mengenai isu kekerasan berbasis gender.

Dukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan

- **Memberikan pelatihan yang bertarget guna memperkuat keterampilan dan kapasitas perempuan** untuk:
 - Berbicara di hadapan publik dengan percaya diri
 - Terlibat dalam diskusi-diskusi tentang ekonomi dan keuangan yang terkait dengan transaksi-transaksi lahan atau tanah, dan
 - Memahami faktor-faktor risiko dari investasi potensial dan kemampuan untuk mengadvokasi taktik-taktik penurunan risiko.²¹
- **Selenggarakan sesi yang dipandu oleh perempuan untuk perempuan** (dan sesi terpisah untuk kelompok marginal lainnya), tetapi pertama-tama adakan juga sesi untuk laki-laki agar mereka memahami alasannya. Pertimbangkan untuk melakukannya melalui organisasi lokal atau komunitas yang terpercaya. Pada "konferensi perempuan" ini, ajarkan perempuan tentang hak-hak mereka dan persiapkan mereka untuk melakukan advokasi diri sebagai sebuah kelompok.
- **Pastikan perempuan terwakili baik sebagai kelompok pemangku kepentingan maupun sebagai pemegang hak individu dan kolektif.** Dalam upaya ini, perhatikan bahwa perempuan mungkin memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kekayaan atau kemiskinan, pendidikan, dan latar belakang mereka.

Contoh di sebuah negara

Di komunitas-komunitas di Tanzania, Filipina, dan Mozambik, perempuan yang menghadiri pertemuan seringkali tetap bergeming.²² Sebuah LSM Tanzania yang telah mendukung komunitas lokal untuk

mengembangkan peraturan desa yang peka gender menemukan bahwa perempuan lebih cenderung terbuka dan berpartisipasi dalam pertemuan jika perwakilan LSM berbicara dengan mereka secara terpisah dan perempuan diberi informasi yang baik tentang isi pertemuan sejak awal proses.²³

Di berbagai komunitas di Uganda, perempuan tidak aktif berpartisipasi dalam pertemuan komunitas lokal untuk mengembangkan peraturan daerah.²⁴ Fasilitator menyelenggarakan "konferensi perempuan" regional khusus bersama dengan perwakilan dari setiap komunitas. Mereka fokus pada pengembangan pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat kehilangan akses terhadap lahan jika mereka tidak terlibat dalam proses tersebut. Melalui pertemuan-pertemuan ini, pentingnya lahan untuk bercocok tanam atau menggembala ternak demi kebutuhan rumah tangga dapat dibahas dan strategi-strategi dapat dikembangkan untuk memastikan suara mereka didengar. Perempuan kemudian pulang ke komunitas mereka dan mengadakan pertemuan serupa, mendokumentasikan penggunaan lahan mereka, dan memutuskan langkah-langkah yang disukai untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya. Perempuan kemudian mulai menghadiri pertemuan komunitas yang lebih luas dalam jumlah yang lebih besar dan mengadvokasi agar kebutuhan mereka dipenuhi dalam proses penyusunan peraturan-peraturan yang berlaku di tempat komunitas berada.

Sebuah LSM yang bekerja di Kenya Utara menemukan bahwa pelatihan kepemimpinan yang menggabungkan permainan peran merupakan metode yang sangat efektif untuk mengembangkan kepercayaan diri perempuan dan mempersiapkan mereka untuk berbicara di depan umum dalam konteks pemerintahan lahan komunal.²⁵



Hambatan: Perempuan tidak didengarkan oleh laki-laki, yang meremehkan keahlian mereka yang berkaitan dengan lahan dan sumber daya alam.

Seperti yang dijelaskan di atas dalam Pendahuluan perangkat ini, partisipasi perempuan yang bermakna dalam keterlibatan komunitas sangat penting untuk berlangsungnya investasi yang bertanggung jawab dan berhasil. Hal ini karena perempuan paling sering bergantung pada lahan komunitas bersama seperti hutan, sumber-sumber air, dan lahan menggembala ternak untuk kelangsungan hidup dan penghidupan rumah tangga mereka. Pekerjaan perempuan—termasuk menanam makanan untuk konsumsi dan penjualan atau perdagangan lokal, mencari makanan, dan memasak—memiliki nilai yang sangat tinggi. Hal ini sangat penting untuk:

- Mewujudkan hak asasi manusia keluarga atas pangan, gizi, air, pendidikan, dan kesehatan, dan
- Melestarikan pengetahuan tradisional masyarakat luas tentang keanekaragaman hayati lokal—misalnya, di mana mengumpulkan tumbuhan penting untuk pengobatan, di mana mengumpulkan jerami terbaik untuk membangun rumah, di mana jamur liar dapat ditemukan.

Namun, manfaat-manfaat ini umumnya tidak diakui atau diberi nilai moneter yang sesuai oleh masyarakat, pemerintah, atau investor. Menolak suara dan kekuasaan perempuan dalam keterlibatan masyarakat tidak hanya melemahkan perempuan tetapi juga dapat merugikan seluruh masyarakat. Hal ini karena lahan bersama ini seringkali merupakan tempat yang sering ditawarkan oleh laki-laki kepada pihak luar untuk investasi. Jika fasilitator keterlibatan masyarakat (dan anggota masyarakat itu sendiri) tidak memahami nilai kegiatan perempuan di area bersama, mereka tidak akan mempertimbangkan pekerjaan perempuan dalam pengambilan keputusan masyarakat, penilaian dampak, rencana kompensasi dan pemukiman kembali, serta proses dan hasil penting lainnya.²⁶

Strategi-strategi

- Dalam pertemuan komunitas, secara tegas mengakui dan mengangkat pentingnya tanggung jawab kerja perempuan.
- Tunjukkan kepada laki-laki dengan memberi contoh (jangan hanya memberi ceramah atau memberi tahu) bagaimana perempuan memegang informasi penting terkait lahan dan sumber daya alam yang mungkin tidak diketahui laki-laki karena tugas-tugas terkait mata pencaharian yang berbeda berdasarkan gender—misalnya, di mana obat-obatan yang diperlukan dapat dikumpulkan, atau tempat-tempat di mana jerami tumbuh dan harus dilindungi. Bantu laki-laki memahami bagaimana pengetahuan dan kearifan perempuan harus hadir untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang konteks, dampak, dan implikasi jangka panjang dari setiap proyek berbasis lahan. Bantu semua anggota

komunitas untuk merenungkan kearifan, keterampilan, minat, dan prasangka spesifik mereka sendiri, kemudian libatkan anggota komunitas dalam menyusun daftar strategi yang mereka buat sendiri untuk memastikan semua suara didengar.

- **Temukan cara untuk menampilkan pengetahuan dan keahlian perempuan.** Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak komunitas untuk bertukar pikiran dan membuat daftar semua sumber daya alam yang dikumpulkan dan digunakan oleh komunitas, menyoroti bahwa, karena tanggung jawab gender mereka, laki-laki dan perempuan memiliki pengetahuan yang berbeda namun saling melengkapi. Alternatifnya, akan bermanfaat untuk mendukung perempuan dalam memetakan keanekaragaman hayati lokal secara komprehensif dan membuat daftar makanan dan obat-obatan yang mereka kumpulkan dan gunakan, kemudian membagikan daftar tersebut kepada seluruh komunitas.
- **Ajarkan kepada para laki-laki tentang hubungan antara keamanan atas kepemilikan lahan bagi perempuan, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan peningkatan gizi, kesehatan, serta hasil pendidikan anak-anak.** Pimpin sesi curah pendapat di mana para laki-laki secara sukarela menyampaikan ide-ide tentang bagaimana ibu, nenek, bibi, dan saudara perempuan mereka menggunakan lahan untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan memelihara ekosistem yang berkembang.
- **Ilustrasikan nilai sebenarnya dari pekerjaan perempuan dengan memberikan nilai moneter pada daftar sumber daya alam yang dikumpulkan oleh perempuan** dari hutan, daerah aliran sungai, dan area penggembalaan. Latihan "penilaian" sederhana dapat menunjukkan kontribusi perempuan terhadap rumah tangga serta nilai sumber daya alam yang ditemukan di area umum dan tersedia bagi anggota masyarakat.²⁷



Hambatan: Laki-laki diandalkan sebagai perwakilan perempuan tetapi sebenarnya tidak mewakili kepentingan perempuan, sehingga perempuan memiliki sedikit kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan perspektif mereka.

Dalam beberapa konteks, investor atau pejabat pemerintah mungkin merasa pantas untuk memasuki sebuah desa dan hanya berbicara dengan pemimpin dan tokoh laki-laki yang dituakan. Namun, laki-laki seharusnya tidak dilihat sebagai perwakilan atau wakil perempuan. Laki-laki seringkali memiliki motivasi dan insentif yang berbeda dari perempuan terkait investasi berbasis lahan. Mereka juga tidak memiliki pengalaman hidup sebagai seorang perempuan, termasuk tekanan yang sama, pekerjaan untuk mencari nafkah, tanggung jawab sehari-hari, peran keluarga, beban, dan pengalaman menghadapi bahaya.

Sebagai contoh, jika investasi tersebut dikaitkan dengan perubahan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat, seperti kesempatan untuk menanam tanaman komersial dalam skema petani mitra, kemungkinan besar laki-laki akan menjadi penerima manfaat utama dari skema tersebut dan akan memperoleh keuntungan lebih besar daripada perempuan. Dalam skenario ini, laki-laki mungkin untuk mendesak agar masyarakat menerima investasi tersebut dan gagal dalam hal benar-benar mewakili kepentingan kaum perempuan.

Contoh hambatan di suatu negara

Di Afrika Barat, staf lapangan dari sebuah LSM lokal memberikan kuesioner pemantauan kepatuhan investasi kepada kelompok-kelompok identitas yang berbeda di sejumlah komunitas (yang terdampak oleh berbagai investasi). Hasil dari bagaimana kelompok-kelompok identitas yang berbeda tersebut mengisi kuesioner menyoroti perbedaan antara pemahaman dan prioritas perempuan dan laki-laki. Di kedua kelompok [keturunan Bantu dan Masyarakat Adat], persepsi dan penilaian perempuan terhadap kepatuhan investor umumnya rendah, berdasarkan dampak investasi terhadap kesehatan anak-anak mereka dan pekerjaan sehari-hari mereka sendiri, seperti pengumpulan kayu bakar dan kualitas air. Sebaliknya, laki-laki keturunan Bantu menilai investasi tersebut sebagian besar sesuai dengan peraturan. Ketika LSM lokal membahas hasil kuesioner yang diisi oleh laki-laki keturunan Bantu dengan perempuan Masyarakat Adat, tanggapan mereka pada dasarnya adalah, "Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan." Namun ketika staf LSM berbicara dengan laki-laki keturunan Bantu tentang apa yang mereka pikirkan tentang perempuan Masyarakat Adat, laki-laki tersebut dengan sangat akurat menggambarkan jawaban perempuan Masyarakat Adat, menunjukkan bahwa mereka memang menyadari dampak tersebut.

Strategi-strategi

- Pastikan perempuan hadir dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan potensi investasi atau proyek pembangunan; pastikan perempuan hadir dalam rapat-rapat pengambilan keputusan penting.
- **Beri kesempatan langsung kepada perempuan untuk berbicara (setidaknya sama banyaknya dengan laki-laki) dan mintalah pandangan, ide, dan pendapat mereka.** Fasilitator dapat mengamati ekspresi wajah perempuan untuk mencari seseorang dengan pemikiran yang kuat (bahkan jika mereka tidak mengangkat tangan) dan secara proaktif serta hormat meminta perempuan untuk berbicara. Fasilitasi adalah sebuah seni: fasilitator rapat harus terlatih dengan baik dan terampil dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berbicara dan membuat laki-laki mendengarkan, memahami, mempertimbangkan, dan mengambil tindakan untuk menerapkan pendapat, kekhawatiran, dan kontribusi perempuan.
- **Pastikan perempuan memimpin dalam mengumpulkan dan berbagi keahlian dan pengetahuan berbasis pengalaman mereka sendiri.** Salah satu caranya adalah melalui kelompok diskusi: Di tengah pertemuan, bagi peserta pertemuan menjadi kelompok diskusi yang terdiri dari laki-laki, perempuan, pemuda (dan subkelompok lain yang sesuai) untuk membahas poin-poin penting. Kemudian, setiap kelompok memilih juru bicara untuk melaporkan kembali hasil diskusi kelompok tersebut.
- **Mendorong para perempuan untuk membentuk kelompok perempuan yang melakukan presentasi kepada seluruh komunitas** dalam pertemuan-pertemuan komunitas.
- Jika perempuan lebih memilih seorang laki-laki untuk mewakili pandangan mereka dalam pertemuan komunitas, **dukung perempuan untuk sepenuhnya menyampaikan pandangan mereka kepada perwakilan yang mereka pilih.** Bekerja samalah dengannya untuk memastikan bahwa ia mewakili gagasan perempuan dengan benar dan dengan cara yang dianggap serius oleh masyarakat luas.



Hambatan: Selama pertemuan, fasilitator tidak mengajukan pertanyaan yang tepat kepada perempuan, atau bahkan tidak mengajukan pertanyaan sama sekali, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prioritas perempuan dan bagaimana proyek tersebut akan berdampak pada kehidupan perempuan.

Memahami gambaran lengkap perspektif perempuan (termasuk semua ragam subkelompok) seputar masalah tata kelola lahan secara umum dan keterlibatan masyarakat secara khusus membutuhkan investigasi yang gigih dan cermat. Seringkali tidak cukup hanya mengajukan satu pertanyaan tentang suatu topik dan mengharapkan jawaban yang lengkap; pertanyaan lanjutan (dibahas lebih lanjut dalam **Kotak 3**) diperlukan.

Seringkali, kuesioner atau rangkaian pertanyaan diarahkan untuk menangkap status quo. Misalnya, kuesioner tersebut hanya berupaya menangkap pemahaman dasar tentang apa yang terjadi pada saat pertanyaan diajukan. Hal ini berisiko mempertahankan status quo yang mungkin sangat diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu, hal ini juga mengabaikan gagasan dan aspirasi perempuan tentang bagaimana mereka menginginkan suatu situasi, sehingga kehilangan kesempatan penting untuk pembangunan gender yang transformatif.

Lebih lanjut, ketika pertanyaan tidak didasarkan pada pemahaman konteks sosial, hukum, kelembagaan, dan budaya yang lebih luas sebagai titik asal dari perempuan setempat berkegiatan, pertanyaan tersebut berisiko melanggengkan pengucilan perempuan. Misalnya, sistem kepemilikan tanah berdasarkan adat dapat menghalangi perempuan untuk memiliki tanah. Hal ini membuat para janda dan perempuan lain yang tidak memiliki laki-laki dalam rumah tangga mereka menjadi sangat rentan. Jika kepemilikan adalah satu-satunya pertanyaan yang diajukan, maka perempuan-perempuan yang terpinggirkan ini akan sepenuhnya diabaikan.

Strategi-strategi

- **Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan pemahaman tentang adat istiadat setempat**—misalnya, menyelidiki siapa yang menggunakan suatu area tanah tertentu, bukan hanya siapa pemiliknya. Bersikaplah sespesifik mungkin saat merumuskan pertanyaan.
- **Ajukan pertanyaan lanjutan terhadap jawaban yang kurang jelas untuk mengetahui bagaimana sebenarnya segala sesuatunya berjalan**—misalnya, rumah tangga mana dan anggota rumah tangga mana yang mengakses, menggunakan, mengambil keputusan tentang, dan memperoleh manfaat dari lahan dan sumber daya berbasis lahan?²⁸ Mungkin ada gunanya untuk terus bertanya, “Apakah ada orang lain [misalnya, kelompok nomaden] yang menggunakan lahan tersebut? Untuk apa mereka menggunakannya?” sampai responden tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Lihat juga **Kotak 3**
- **Ajukan pertanyaan yang bertujuan untuk memahami bagaimana topik yang dibahas** (misalnya, penggunaan sumber daya alam atau kekuasaan pengambilan keputusan) **telah berkembang dari waktu ke waktu** di dalam komunitas (yaitu, bagaimana keadaannya dulu dibandingkan dengan bagaimana keadaannya sekarang) dan apa yang diinginkan oleh berbagai subkelompok perempuan.

Contoh solusi di suatu negara

Sebuah perusahaan gula di sebuah negara Afrika sedang merancang proyek kesejahteraan sosial untuk masyarakat setempat dan mengidentifikasi beberapa lahan yang kurang optimal untuk menanam makanan.²⁹ Pada prinsipnya, penggunaan lahan tersebut untuk proyek tersebut dapat bermanfaat bagi sebagian masyarakat. Namun, hal itu akan sangat merugikan para perempuan yang sudah menggunakan lahan tersebut untuk menanam makanan guna menopang kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Baru setelah pertanyaan lanjutan diajukan, para janda diidentifikasi sebagai pengguna utama (dan karenanya pihak yang dirugikan) dan skema tersebut diubah.

Kotak 3: Pentingnya pertanyaan-pertanyaan lanjutan

Selama kegiatan komunitas sedang berlangsung, demi mengetahui jawaban sesungguhnya dari perspektif seorang perempuan, perlu ditanyakan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Contoh, bisa gunakan skenario di bawah ini:

Pewawancara: “Apakah lahan ini kosong?”

Tokoh laki-laki: “Ya.”

Seringkali, pertanyaan berhenti pada saat mendapatkan respons pertama. Namun, dengan bertanya lebih lanjut dapat mengungkapkan informasi lain yang lebih lengkap:

Pewawancara: “Apakah lembaga pastoral menggunakan lahan ini?”

Tokoh laki-laki: “Tidak.”

Pewawancara: “Apakah ada yang menggembalakan ternaknya di lahan ini?”

Tokoh laki-laki: “Ya. Para perempuan di komunitas kami mengambil kayu bakar dan ubi jalar dari lahan ini.”

Pewawancara: “Kepada para perempuan, untuk keperluan apa anda menggunakan kayu bakar dan Women, what do you/they use the firewood and wild yams for?”

Janda X dan Y: “Kami menggunakan kayu bakar untuk menghangatkan rumah kami—untuk kami jual—dan ubi adalah sumber makanan utama bagi kami dan anak-anak kami.”

Pewawancara: “Apakah perempuan memiliki hak atas tanah terhadap lahan tempat mereka mengambil sumber-sumber daya ini yang penting bagi keberlangsungan hidup keluarganya?”

Tokoh laki-laki: “Tidak.”

Dalam skenario tersebut, jika pewawancara tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, lahan yang diklasifikasikan sebagai lahan kosong tetapi sebenarnya digunakan oleh perempuan masyarakat setempat dapat dialokasikan untuk investasi, sehingga perempuan setempat kehilangan sumber bahan bakar dan nutrisi penting bagi keluarga mereka. Dalam skenario tersebut, jika pewawancara tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, lahan yang diklasifikasikan sebagai lahan kosong tetapi sebenarnya digunakan oleh perempuan masyarakat setempat dapat dialokasikan untuk investasi, sehingga perempuan setempat kehilangan sumber bahan bakar dan nutrisi penting bagi keluarga mereka.

Staf proyek harus berupaya menganalisis pola penggunaan lahan dari beragam anggota komunitas dan waspada terhadap berbagai pertanyaan lanjutan yang mungkin muncul secara alami selama pertemuan. Beberapa pertanyaan ini dapat diantisipasi dan dimasukkan sebagai bagian dari daftar pertanyaan yang akan diajukan selama keterlibatan komunitas.



Hambatan: Laki-laki membuat keputusan akhir atas nama komunitas.

Sekalipun perempuan hadir dalam rapat dan memiliki suara, ini tidak serta merta berarti bahwa laki-laki akan membiarkan mereka membantu dalam pengambilan keputusan. Pengecualian ini bisa bersifat formal atau *de facto*.

Pertama, badan kepemimpinan komunitas **formal** (seperti dewan tetua masyarakat) atau badan pengelolaan lahan komunitas bisa saja seluruhnya terdiri dari laki-laki yang membuat keputusan berdasarkan penilaian terbaik mereka sendiri, yang mungkin mempertimbangkan kepentingan perempuan atau mungkin juga tidak.

Kedua, sebagai aturan atau asumsi **de facto** dalam pertemuan komunitas, setelah komunitas membahas suatu masalah secara panjang lebar, para pemimpin laki-laki dan tetua laki-laki dapat mengambil keputusan akhir. Dalam melakukannya, mereka mungkin tidak mempertimbangkan kekhawatiran dan kepentingan perempuan. Dalam kasus seperti itu, meskipun perempuan telah berhasil hadir dalam pertemuan dan telah berbicara serta berpartisipasi aktif dalam diskusi komunitas, keputusan akhir yang dibuat mungkin bukan hasil yang mereka inginkan.

Pada akhirnya, pihak luar yang bersangkutan mungkin juga gagal mematuhi keputusan komunitas, termasuk keputusan yang secara bermakna melibatkan suara perempuan.

Strategi-strategi

- Perubahan akan lebih efektif ketika laki-laki—terutama para tetua dan kepala suku—menjadi aliansi bagi kaum perempuan. **Bekerja samalah dengan kepala suku, tetua, dan pemimpin agama untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat**, dengan membingkai keahlian dan kearifan perempuan sebagai manfaat bagi seluruh masyarakat. Lihat *Hambatan: Perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat atau tidak seharusnya menghadiri pertemuan tentang lahan* untuk strategi -strategi yang diarahkan pada pengembangan pengetahuan lokal tentang hak-hak perempuan.

Merencanakan kegiatan-kegiatan pelibatan

- **Dukung masyarakat untuk menyusun rencana secara cermat tentang bagaimana mereka akan mengambil keputusan terkait keterlibatan masyarakat, terutama selama proses konsultasi dan negosiasi.** Mendiskusikan semuanya terlebih dahulu dan buatlah rencana aksi umum yang dapat membantu membuat pengambilan keputusan lebih adil dan inklusif. Diskusi ini dapat membahas hal-hal berikut:
 - Siapa yang berhak memutuskan apakah suatu investasi diterima atau tidak, dan bagaimana investasi tersebut akan berinteraksi dengan masyarakat? Akankah semua warga, termasuk perempuan, kaum muda, dan anggota kelompok marginal diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan didengarkan? Apa yang akan terjadi jika kelompok minoritas sangat tidak setuju dengan mayoritas?

- Bagaimana keputusan akan dibuat? Berapa persentase warga komunitas yang harus menyetujui? Apakah baik perempuan dan laki-laki akan memiliki hak suara?
- Proses apa yang dapat diikuti masyarakat jika para pemimpin mereka atau tetua dan pemimpin tertentu setuju untuk mengalokasikan sejumlah besar tanah kepada pihak luar tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat? Strategi apa yang dapat dilakukan perempuan jika para pemimpin laki-laki membuat keputusan yang merampas hak perempuan atau menghambat akses mereka ke tanah yang mereka andalkan untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga mereka?
- Jika relevan, **dorong dan dukung perempuan untuk mencalonkan diri dalam peran kepemimpinan di struktur tata kelola komunitas, dan berikan bimbingan dan pelatihan untuk mempersiapkan mereka menghadapi peran tersebut.**
- **Mengidentifikasi dan mempromosikan contoh-contoh historis atau adat istiadat di mana perempuan memiliki peran dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan lahan.** Mengungkit cerita tradisional atau praktik leluhur dapat membantu mengubah persepsi dan mengingatkan kaum laki-laki bahwa kepemimpinan perempuan juga merupakan adat istiadat tradisional.

Terlibat dengan pihak luar

- **Mendukung diskusi di seluruh komunitas tentang siapa yang seharusnya berada dalam tim negosiasi antara komunitas dan pihak luar.** Tekankan bahwa perempuan memiliki keahlian dan pengetahuan yang berbeda dari laki-laki, sebagai akibat dari pekerjaan mereka yang didominasi perempuan, dan bahwa negosiasi apa pun akan tidak lengkap tanpa pengetahuan perempuan. Untuk memilih orang yang tepat untuk melakukan hal ini, komunitas dapat mengadakan pertemuan besar dan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - Akankah para tetua komunitas, pemimpin terpilih, atau tim negosiasi khusus yang terdiri dari laki-laki, perempuan, pemuda, dan tetua yang dipilih secara khusus untuk peran tersebut mewakili komunitas?
 - Bagaimana tim negosiasi dapat mewakili semua kelompok pemangku kepentingan di masyarakat, sehingga pendapat semua anggota masyarakat dapat dipertimbangkan?
 - Kualitas, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan apa yang harus dimiliki anggota tim untuk memastikan perlindungan komprehensif terhadap kepentingan masyarakat?
- **Mewajibkan agar informasi dan semua draf perjanjian yang dinegosiasikan dibagikan secara lisan kepada seluruh komunitas dalam pertemuan komunitas yang dipublikasikan secara luas, serta dalam bentuk tertulis, dan agar perempuan memiliki waktu untuk meninjau dan memahami dokumen-dokumen ini sebelum keputusan dibuat.**
- **Mendukung perwakilan perempuan untuk menyampaikan prioritas perempuan ke dalam semua keterlibatan dan kesepakatan komunitas.**
- **Mendukung perempuan untuk memilih pemimpin perempuan yang kuat dan berani yang dapat berbicara atas nama mereka dalam semua pertemuan tata kelola komunitas dan selama interaksi dengan pihak luar.**

Catatan kaki untuk Alat 1 dapat dilihat di akhir dari alat ini secara keseluruhan.

Alat 2. Daftar Periksa Perencanaan Keterlibatan Komunitas yang Inklusif bagi Perempuan

Bagaimana menggunakan Alat 2

Alat ini merupakan bagian dari [Alat Panduan untuk Meningkatkan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas](#). Informasi tentang penggunaan kata dan konteks dapat ditemukan di Pendahuluan alat panduan tersebut.

Daftar periksa ini menjabarkan strategi-strategi yang diuraikan dalam Alat 1: Mengidentifikasi dan Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Perempuan dalam Partisipasi yang Bermakna dalam Keterlibatan Komunitas, dalam bentuk yang dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan. Daftar periksa ini dirancang untuk membantu pengguna mengantisipasi dan mengatasi beberapa tantangan yang mungkin mereka hadapi ketika berupaya mendapatkan partisipasi perempuan yang bermakna (kehadiran, suara, dan kekuasaan) dalam keterlibatan komunitas.

Seperti yang dijelaskan dalam Pendahuluan perangkat ini, keterlibatan masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk di sepanjang siklus hidup investasi berbasis lahan. Sebagai ringkasan, jenis keterlibatan masyarakat terkait investasi berbasis lahan yang mungkin bermanfaat bagi Alat 2 meliputi:

- Membangun hubungan yang berkelanjutan
- Peningkatan kapasitas, kesadaran, dan pendidikan
- Konsultasi
- Penilaian dampak dan kinerja sosial
- Negosiasi
- Pembuatan kesepakatan
- Permintaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
- Perancangan dan implementasi mekanisme pengaduan

Pertemuan kelompok formal (baik seluruh komunitas atau hanya untuk perempuan saja) adalah bentuk keterlibatan komunitas yang sangat umum, tetapi ada banyak cara lain untuk berinteraksi dengan anggota komunitas secara individual atau dalam kelompok yang lebih kecil, seperti percakapan dengan perempuan saat mereka bekerja (misalnya saat mengambil air di sumur bor dan sumur alami), mengunjungi orang-orang di rumah mereka, dan bertukar pesan teks atau audio melalui telepon. Pendekatan alternatif ini dapat sangat membantu dalam mengatasi hambatan yang diuraikan dalam perangkat ini.

Alat 2 bertujuan untuk membuat strategi yang diuraikan dalam Alat 1 lebih mudah diterapkan dengan memecahnya menjadi strategi yang dapat diterapkan pada semua kegiatan (termasuk pertemuan kelompok) dan strategi yang lebih relevan dengan konteks pertemuan kelompok. Kategori-kategori ini tidak tetap; ini hanyalah saran tentang cara mengatur konten. Menggunakan Alat 2 dalam bentuk dokumen *Word* akan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan alat tersebut dengan mengedit, menghapus, mengatur, dan menambahkan strategi. Yang penting, daftar periksa ini tidak menjelaskan semua hal yang harus dilakukan untuk memastikan partisipasi maksimal oleh perempuan; kami mendorong pengguna untuk menggunakan daftar periksa ini sebagai titik awal untuk pemikiran kritis, kreatif, dan perencanaan mereka sendiri.

Navigasi – Daftar periksa isi

Persiapan prapelibatan	30
1. Merencanakan dan menganggarkan	30
2. Melakukan kurasi tim dan membentuk aliansi.....	30
3. Memastikan tim memahami konteks setempat.....	32
Seluruh kegiatan pelibatan	32

1. Berbagi informasi relevan dengan cara yang baik.....	32
2. Memperluas kesadartahuan dan pemahaman komunitas akan hak-hak, keahlian dan kearifan perempuan	33
Keahlian dan kearifan perempuan.....	33
Hak-hak perempuan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Kumpulkan informasi dan masukan dari perempuan.....	35
Penjadwalan dan pengorganisasian pertemuan seluruh komunitas.....	36
1. Pilih waktu dan lokasi pertemuan yang dapat memastikan perempuan dapat hadir	36
2. Publikasikan pertemuan yang ada kepada perempuan dan buat strategi-strategi untuk memastikan perempuan dapat hadir	36
3. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi perempuan untuk hadir dalam pertemuan	36
Memfasilitasi pertemuan-pertemuan seluruh komunitas.....	Error! Bookmark not defined.
1. Memastikan perempuan bersuara dalam pertemuan dan bahwa masukan dari mereka ditanggapi secara serius	38
2. Memastikan bahwa perempuan memainkan peranan aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan komunitas dan dalam pelibatan dengan pihak luar	38
Mendukung pertemuan-pertemuan khusus perempuan	38

Persiapan prapelibatan

Berikut adalah strategi-strategi yang dapat membantu untuk dicoba diterapkan ke dalam seluruh jenis pelibatan.

1. Merencanakan dan menganggarkan

- Siapkan rencana dan perkiraan jangka waktu terkait keterlibatan komunitas Anda. Ingatlah bahwa agar keterlibatan tersebut bermakna, Anda perlu membangun kepercayaan dan tidak terburu-buru. Alokasikan waktu sebanyak mungkin untuk proses keterlibatan Anda.
- Siapkan anggaran untuk menunjukkan bagaimana strategi yang akan Anda terapkan akan didanai. Ingatlah untuk menyertakan pos anggaran untuk pembayaran anggota tim eksternal, seperti konsultan gender, organisasi masyarakat sipil, narahubung setempat, dan lain-lain.

2. Melakukan kurasi pada tim dan membentuk aliansi

- Dalam kolaborasi dengan komunitas, identifikasi dan bangun hubungan kerja dengan dua orang lokal (seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang bertanggung jawab untuk mendukung komunikasi tim Anda dengan komunitas. Pertimbangkan dengan cermat siapa yang akan memainkan peran ini: Pilih orang-orang yang jujur, dihormati, dan dipercaya oleh komunitas—terlepas dari status, latar belakang, atau kelompok tempat orang-orang tersebut berada—serta reflektif dan bijaksana tentang budaya, norma, dan dinamika komunitas. Mungkin yang terbaik adalah memilih individu yang mewakili berbagai latar belakang sosial ekonomi, etnis, dan agama lokal untuk memastikan bahwa seluruh komunitas merasa terwakili oleh mereka. Untuk menghargai waktu mereka, pertimbangkan untuk membayar mereka dengan uang, pelatihan keterampilan, dan pulsa (kredit telepon seluler) dan dengan cara lain.
- Tunjuklah seorang konsultan gender untuk tim penugasan. Konsultan tersebut akan bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan strategi gender, serta memastikan semua anggota tim terlibat dalam strategi tersebut. Pilihlah seseorang yang memiliki pengalaman signifikan dalam bidang inklusivitas gender di tingkat komunitas di wilayah tempat Anda akan bekerja. Jika memungkinkan, pilihlah seseorang yang benar-benar memahami budaya dan Bahasa yang digunakan di daerah tersebut, serta nuansa

kekuasaan dan pengecualian yang terjadi di tingkat desa. Konsultan harus diberi wewenang untuk membuat keputusan yang relevan dan menerapkan tindakan yang diperlukan. Jika tidak ada anggaran untuk konsultan gender, pertimbangkan untuk mempekerjakan anggota tim lapangan dengan pengalaman dan pengetahuan ini dan jadikan ini salah satu tanggung jawabnya.

- Mengidentifikasi dan membangun hubungan kerja (bila sesuai, dengan imbalan) dengan organisasi masyarakat sipil lokal atau organisasi hak-hak perempuan yang relevan yang bekerja dengan perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang dapat:
 - Memberikan wawasan, saran dan dukungan
 - Mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan
 - Memfasilitasi pertemuan, dan
 - Mengidentifikasi dan memobilisasi kelompok-kelompok dan jejaring perempuan yang relevan.
- Bekerjasamalah dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan perempuan di komunitas, karena suami atau kerabat laki-laki lainnya cenderung menghormati dan merasa lebih nyaman dengan pertemuan atau program yang melibatkan pemerintah.
- Tekankan peran para pemimpin tradisional dan kepala suku, tetua, dan pemimpin agama sebagai pelindung anggota masyarakat dan hak-hak, martabat, dan kesetaraan yang melekat pada semua orang, memastikan bahwa pentingnya melindungi hak dan kepentingan perempuan dirumuskan dengan cara yang menarik bagi para pemimpin dan menginspirasi mereka untuk membela hak-hak perempuan.

3. Memastikan bahwa tim memahami konteks lokal

- Mintalah saran dan bimbingan dari konsultan gender, pemandu lokal, dan organisasi hak-hak perempuan mengenai cara terbaik untuk memahami dan menavigasi norma budaya lokal dan praktik tradisional yang relevan dengan cara yang tidak secara tidak sengaja tidak menghormati norma dan praktik tersebut (dan dengan demikian mengasingkan anggota komunitas) sambil tetap mengangkat suara perempuan. Hal ini mungkin termasuk mendokumentasikan norma dan praktik tersebut agar terlihat oleh semua orang dan memberikan dasar untuk mulai mengarahkan perubahan konkret dan partisipatif.
- Bersama dengan pemandu lokal dan konsultan gender, diskusikan dan buatlah daftar hal-hal yang bisa menghalangi perempuan untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Hal ini dapat mencakup mengungkap dan memahami prasangka masyarakat terkait perempuan, serta bagaimana dinamika kekuasaan lokal dapat dipengaruhi oleh kebijakan, investasi, atau intervensi berbasis lahan lainnya yang diusulkan.
- Mulailah mengembangkan pemahaman tentang dinamika kekuasaan yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan atau investasi yang diusulkan dan pertimbangkan bagaimana dinamika tersebut dapat terwujud.
- Mintalah saran dari pemandu lokal, perwakilan komunitas, dan organisasi-organisasi terkait hak-hak perempuan mengenai cara terbaik untuk mengatur struktur pertemuan agar keselamatan perempuan tidak terancam. Tergantung pada konteksnya, mungkin akan bermanfaat untuk mengadakan pertemuan di lokasi yang dirasa aman oleh perempuan. Pertemuan ini mungkin lebih aman jika hanya dihadiri perempuan; dalam keadaan lain, mungkin lebih aman bagi perempuan untuk memilih laki-laki yang dipercaya untuk hadir.
- Konsultasikan dengan kaum perempuan dan pemimpin perempuan setempat (mungkin dengan mengunjungi mereka di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi atau berkumpul, seperti di sumur air, pasar, dan rumah) tentang apa yang mungkin menghalangi perempuan untuk menghadiri pertemuan atau kegiatan lainnya dan cari tahu informasi, seperti:
 - Hari apa, jam berapa dan lokasi-lokasi di mana perempuan kemungkinan besar berada?
 - Minggu-minggu yang mana saja yang sebaiknya pertemuan tidak diadakan, karena bersamaan dengan musim tanam atau peristiwa penting lainnya?
 - Dengan cara apalagi tim fasilitasi dapat memudahkan atau menyingkirkan hambatan-hambatan lainnya yang menghalangi kehadiran perempuan?
 - Buatlah pemetaan terhadap jadwal-jadwal para perempuan secara hati-hati guna mengetahui kapan waktu yang tepat (contohnya, setelah memasak sarapan, mengumpulkan kayu bakar, menimba air,

dan sebelum menyiapkan makan malam). Jangan jadwalkan pertemuan komunitas selama masa penanaman dan panen, kecuali calon peserta perempuan telah menyetujui sebelumnya.

- Cari tahu dukungan apa saja yang dapat membantu perempuan untuk hadir di pertemuan, misalnya penyediaan layanan penitipan anak, transportasi, dan makanan.

Mungkin akan lebih efektif untuk bertemu dengan perempuan lokal di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi atau berkumpul, seperti di sumur air, pasar, atau rumah. Strategi yang sama dapat digunakan sepanjang proyek untuk menanyakan kepada para perempuan setempat tentang pengalaman dan keterlibatan mereka dalam proyek tersebut.

Seluruh pelibatan

Ini adalah strategi yang dapat bermanfaat untuk dicoba dalam semua jenis keterlibatan. Sebagai prasyarat untuk semua keterlibatan, sangat penting untuk **membangun kepercayaan dengan masyarakat dan tidak terburu-buru**. Sangat bermanfaat untuk membangun kepercayaan dengan para pemimpin masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (termasuk para pemimpin yang mungkin tidak terpilih tetapi memegang kepemimpinan dengan cara lain).

1. Berbagi informasi yang relevan dengan cara-cara yang tepat

Informasi apa yang relevan akan bergantung pada setiap konteks. Misalnya, informasi tersebut dapat berupa detail tentang pertemuan seluruh komunitas atau pertemuan khusus perempuan yang direncanakan, informasi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, informasi tentang kebijakan atau proyek yang direncanakan untuk menginformasikan komunitas secara umum, detail penilaian dampak, atau permintaan masukan, di antara banyak jenis informasi lainnya.

- Terjemahkan informasi ke dalam bahasa setempat. Bekerja samalah dengan penerjemah dan juru bahasa yang dapat Anda percayai, utamakan pilih penerjemah perempuan dan orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya lokal.
- Umumkan detail pertemuan di program radio lokal yang didengarkan oleh perempuan. Mintalah stasiun radio untuk menyediakan segmen singkat untuk membahas informasi yang relevan (misalnya, sesi tanya jawab antara dua pembawa acara tentang prospek kesepakatan lahan).
- Dorong komunikasi verbal dan dari mulut ke mulut di antara perempuan.
- Jika ada, gunakan media sosial lokal yang disukai untuk menargetkan perempuan yang melek huruf dan memiliki perangkat (menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Signal, Telegram, dan Messenger).
- Desain brosur dan selebaran lainnya dengan teks sederhana menggunakan ukuran font besar, disertai gambar penjelasan dan alat bantu visual lainnya.
- Tempelkan selebaran berisi informasi di tempat-tempat di mana perempuan berkumpul, seperti sumur bor air, sumur alami, dan pasar, serta berbagai tempat berkumpul masyarakat (seperti gereja, masjid, sekolah, pusat layanan kesehatan/klinik). Pastikan selebaran tersebut mencantumkan detail penting. Misalnya, jika selebaran tersebut berkaitan dengan pertemuan yang direncanakan, sertakan detail tempat pertemuan, waktu, topik yang akan dibahas, dan pengaturan praktis apa (seperti penitipan anak) yang akan dilakukan agar perempuan dapat hadir.
- Atur agar para pemimpin atau penggerak komunitas mengunjungi rumah-rumah warga, menyampaikan informasi secara lisan tentang pertemuan tersebut dan hal-hal lain yang relevan, menekankan perlunya partisipasi aktif perempuan, dan secara proaktif meminta perempuan untuk hadir.
- Mewajibkan agar informasi dan semua draf perjanjian yang dinegosiasikan disebarluaskan secara lisan kepada seluruh komunitas dalam pertemuan komunitas yang dipublikasikan secara luas, serta dalam bentuk tertulis, dan agar perempuan memiliki waktu untuk meninjau dan memahami dokumen-dokumen ini sebelum keputusan dibuat.

- Berikan dukungan teknologi jika diperlukan. Ini mungkin termasuk menyediakan akses ke komputer dengan koneksi internet atau ponsel pintar untuk meninjau informasi relevan yang mungkin hanya tersedia secara daring.

2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak, keahlian, dan kearifan perempuan.

Ini bisa terjadi di pertemuan-pertemuan seluruh komunitas atau dalam forum-forum yang bersifat lebih privat.

- Selenggarakan pertemuan khusus kaum laki-laki sedini mungkin untuk membahas isu-isu gender secara spesifik dengan mereka dan menciptakan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan persepsi, kekhawatiran, dan pandangan mereka. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh laki-laki yang turut memperjuangkan agenda gender.

Keahlian dan kearifan perempuan

- Temukan cara untuk menampilkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh kaum perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak komunitas untuk bertukar pikiran dan membuat daftar semua sumber daya alam yang dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh komunitas, menyoroti bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki pengetahuan yang berbeda namun saling melengkapi, dikarenakan oleh tanggung jawab gender mereka. Alternatifnya, akan bermanfaat untuk mendukung perempuan dalam memetakan keanekaragaman hayati lokal secara komprehensif dan membuat daftar makanan dan obat-obatan yang mereka kumpulkan dan gunakan, kemudian membagikan daftar tersebut kepada seluruh komunitas.
- Buatlah ilustrasi tentang nilai sebenarnya dari pekerjaan perempuan dengan memberikan nilai moneter pada daftar sumber daya alam yang dikumpulkan oleh perempuan dari hutan, daerah aliran sungai, dan area penggembalaan ternak. Latihan penilaian sederhana dapat menunjukkan kontribusi perempuan terhadap rumah tangga serta nilai sumber daya alam yang ditemukan di area umum dan tersedia bagi anggota masyarakat.^{iv}
- Tunjukkan wawasan dan keahlian ini dan perlihatkan kepada laki-laki melalui contoh (jangan menguliah atau memerintah) tentang bagaimana perempuan memiliki kearifan penting terkait lahan dan sumber daya alam yang mungkin tidak diketahui laki-laki, sebagai akibat dari tugas-tugas terkait mata pencaharian yang berbeda berdasarkan gender. Misalnya, staf proyek dapat:
 - Memimpin sesi curah pendapat di mana laki-laki secara sukarela memberikan gagasan tentang bagaimana ibu, nenek, bibi, dan saudara perempuan mereka menggunakan lahan untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan menjaga ekosistem agar tetap berkembang.
 - Mendukung penjelasan lisan atau kunjungan temu muka yang dilakukan perempuan (bila perlu) di mana obat-obatan yang diperlukan dapat dikumpulkan, jerami tumbuh dan harus dilindungi, makanan liar dicari, perempuan melakukan ritual budaya atau spiritual yang penting, air dikumpulkan, pakaian dicuci, dan sebagainya
- Bantulah kaum laki-laki untuk memahami bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan perempuan sangat penting untuk memahami gambaran lengkap tentang konteks, dampak, dan implikasi jangka panjang dari investasi berbasis lahan.

Hak-hak perempuan

- Jelaskan kepada seluruh komunitas bagaimana perempuan akan secara langsung terdampak oleh masalah-masalah yang akan dibahas. Jelaskan bahwa suara perempuan itu penting dan bagaimana pokok-pokok bahasan dari kegiatan tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka, oleh karena itu mereka perlu bergabung dalam kegiatan komunitas.
- Bantulah para laki-laki dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk memahami bahwa seluruh komunitas akan mendapat manfaat dengan memenuhi kebutuhan perempuan dan kelompok marginal

^{iv} For an explanation of how to undertake a valuation exercise See Knight, Vogelsang, and Brinkhurst, *Valuation of Community Lands and Natural Resources*.

secara umum dan dalam konteks proyek investasi. Misalnya, staf proyek dapat memeragakan dua skenario: satu di mana wawasan perempuan diabaikan dan kemudian masalah muncul, dan yang lainnya adalah di mana pengetahuan perempuan memberikan masukan pada desain dan implementasi proyek dan hasilnya lebih baik untuk semua. Skenario-skenario ini dapat dibangun di dalam:

- Pengetahuan yang unik tentang lahan yang dimaksud (misalnya, perempuan yang memanfaatkan lahan marginal tersebut mengetahui bahwa curah hujan di lokasi tersebut lebih sedikit sehingga tanaman komoditas dengan kebutuhan air yang tinggi tidak akan dapat bertahan hidup hanya dengan air hujan)
 - Solusi dan ide-ide yang berwawasan ke depan (misalnya, mereka dapat menyarankan tanaman yang tumbuh subur di sana dan pengguna spesifik lahan tersebut dapat dipekerjakan untuk mengelola pekerjaan di lokasi tersebut, yang akan menghasilkan hasil lebih tinggi), dan
 - Masalah-masalah yang berpotensi muncul di masa depan dan dampak negatif jika dilakukan pemecahan masalah untuk pencegahan proaktif (misalnya, jika lahan dibuka di kawasan yang di mana ada tanaman obat penting, perempuan tersebut tidak akan mampu mengobati penyakit yang umum di masyarakat; namun jika kawasan tertentu tetap dilestarikan dan perempuan tersebut masih dapat mengaksesnya, maka investasi dan kebutuhan obat masyarakat akan terpenuhi)
- Atasi kekhawatiran kaum laki-laki bahwa penguatan hak-hak perempuan akan mengurangi kekuasaan mereka. Mobilisasi kaum laki-laki untuk menjadi pendukung kesetaraan gender dengan mengembangkan pemahaman mereka:
- Bahwa dengan memberdayakan perempuan dan anak perempuan juga berarti memberdayakan laki-laki (bekerja dengan kaum muda—laki-laki muda—mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih cepat karena mereka mungkin lebih terpapar dan terbuka terhadap perubahan budaya).
 - Bahwa keseimbangan kekuasaan bukanlah antara laki-laki dan perempuan, tetapi bagaimana suatu komunitas dapat berada dalam posisi terkuat secara keseluruhan untuk terlibat dan bernegosiasi dengan pihak luar. Laki-laki dan perempuan akan mendapat manfaat jika perempuan juga diberi tempat di meja perundingan: pengetahuan dan keahlian perempuan akan melengkapi pengetahuan dan keahlian laki-laki, memungkinkan komunitas secara keseluruhan untuk memanfaatkan gabungan kebijaksanaan dan kekuatan tersebut untuk hasil yang lebih baik.
 - Mengenai hubungan antara keamanan kepemilikan lahan bagi perempuan, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan hasil yang lebih baik bagi anak-anak dan anggota masyarakat
 - Tentang manfaat dari mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perencanaan proyek dan pengurangan risiko

Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti:

- Pertemuan dengan para pemimpin adat
- Agenda khusus dalam pertemuan komunitas umum
- Pertemuan formal khusus laki-laki termasuk pemuda, dan
- Diskusi informal dengan para laki-laki di tempat-tempat mereka biasa menghabiskan waktu

Berbagai pendekatan bisa bermanfaat, seperti:

- Menunjukkan hal ini melalui kegiatan pemetaan dan penilaian, dan
- Menemukan pemimpin yang simpatik dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya secara sosial (seperti tokoh olahraga dan budaya) dan mendorong mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mendidik laki-laki dan anak laki-laki lainnya.

- Jika ada, buatlah daftar undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang mendorong kesetaraan gender dan bandingkan dengan norma-norma adat yang mendiskriminasi perempuan. Latihan ini dapat menjadi bagian dari sesi literasi hukum yang harus diselenggarakan untuk masyarakat guna membahas tata kelola lahan dan hak asasi manusia lingkungan dalam konteks investasi berbasis lahan. Jika bisa dilakukan, bekerja samalah dengan para pemimpin dan anggota masyarakat untuk mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum nasional serta internasional, dan ciptakan peluang dinamis bagi masyarakat untuk secara kritis merefleksikan tradisi mereka dan menyesuaikannya agar berkembang sesuai dengan konteks saat ini.

- Identifikasi dan promosikan contoh-contoh historis atau adat di mana perempuan memiliki peran dalam posisi kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan lahan. Di banyak budaya, pengambilan keputusan dan kepemimpinan komunitas lebih setara dalam hal gender sebelum penjajahan. Mengungkit cerita tradisional atau praktik leluhur dapat membantu mengubah persepsi dan mengingatkan laki-laki bahwa kepemimpinan perempuan juga merupakan adat tradisional.
- Ajarkan seluruh komunitas tentang hak-hak perempuan (lihat Alat 3). Termasuk pelatihan yang ditargetkan untuk laki-laki agar memahami tentang mengapa kehadiran, suara, dan kekuatan perempuan dalam pertemuan komunitas itu penting dan mengapa mereka harus mengajak perempuan di rumah dan lingkungan sekitar mereka untuk hadir di pertemuan komunitas. Alih-alih ceramah, carilah pendekatan partisipatif dan interaktif yang dimulai dengan apa yang sudah diketahui komunitas tentang hak-hak perempuan, dan bangun pengetahuan serta kesadaran dari sana.
- Bekerja sama dengan sekolah dan program kepemudaan untuk menanamkan sikap kesetaraan gender pada generasi mendatang, memastikan bergulirnya transformasi jangka panjang.

3. Kumpulkan informasi dan masukan-masukan dari perempuan

- Bersikaplah kreatif dalam mengumpulkan masukan dan umpan balik dari perempuan, terutama Ketika dinilai tidak aman bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan komunitas atau kegiatan lainnya. Staf perempuan dalam proyek yang bersangkutan dapat:
 - Menghubungi perempuan setempat untuk meminta masukan mereka melalui telepon
 - Mengunjungi perempuan di rumah untuk percakapan pribadi satu lawan satu
 - Bertemu perempuan di tempat mereka bekerja (misalnya, tempat mereka mengambil air, mencuci pakaian, menjual hasil pertanian)
 - Merekam atau menerima rekaman audio anonim
 - Menggunakan cara lain untuk mengumpulkan informasi dan umpan balik, seperti pesan teks atau pesan melalui media sosial (seperti WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger), dengan mempertimbangkan keamanan digital dan platform terenkripsi (seperti Telegram atau Signal), dan
 - mendukung perwakilan komunitas untuk mengumpulkan umpan balik dari perempuan secara individual

Mengumpulkan masukan dari para wanita (secara anonim) ke dalam dokumen singkat atau brosur bisa menjadi sesuatu yang berguna agar dapat dibagikan lebih luas, misalnya kepada pejabat pemerintah atau perwakilan dari calon investor.

- Mendukung perwakilan perempuan untuk menyampaikan prioritas perempuan ke dalam semua keterlibatan dan kesepakatan komunitas.
- Mengidentifikasi dan mendorong adanya panutan yang relevan secara kontekstual serta perempuan inspiratif untuk menyebarkan informasi dan mendorong perempuan lain untuk terlibat.
- Berikan perhatian dan dukungan kepada perempuan yang mungkin berada di lingkungan keluarga yang lebih kondusif untuk menghadiri pertemuan sebagai duta kesetaraan gender atau bahkan mewakili mereka yang mungkin tidak dapat hadir.
- Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan pemahaman tentang adat istiadat setempat, misalnya, menyelidiki siapa yang menggunakan area tanah tertentu, bukan hanya siapa pemiliknya. Rumuskan pertanyaan spesifik mungkin.
- Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk memahami bagaimana topik yang dibahas (misalnya, penggunaan sumber daya alam atau kekuasaan pengambilan keputusan) telah berkembang dari waktu ke waktu di dalam komunitas (yaitu, bagaimana keadaannya dulu dibandingkan dengan keadaannya sekarang) dan apa yang diinginkan oleh berbagai subkelompok perempuan.
- Ajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan (lihat kiat-kiat di **Kotak 3** pada Alat 1) untuk jawaban yang kurang jelas guna mengetahui bagaimana sebenarnya kegiatan biasa berjalan. Misalnya, rumah tangga mana dan anggota rumah tangga mana yang mengakses, menggunakan lahan yang dimaksud, mengambil keputusan

tentang lahan tersebut, dan mendapatkan manfaat darinya dan sumber daya berbasis lahan? Mungkin juga berguna jika bisa terus bertanya, “Apakah ada orang lain (seperti kelompok nomaden) yang menggunakan lahan tersebut? Untuk apa mereka menggunakannya?” sampai responden tidak memiliki hal lain untuk dikatakan.

Menjadwalkan dan mengatur pertemuan seluruh komunitas.

Berikut adalah strategi-strategi yang dapat sangat membantu saat mengadakan pertemuan kelompok.

1. Pilih waktu dan lokasi pertemuan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menghadirinya.

- Jadwalkan pertemuan pada hari dan waktu yang sesuai dengan rutinitas kerja perempuan untuk memastikan bahwa perempuan lebih dimudahkan untuk menghadirinya.
- Selenggarakan pertemuan di dekat tempat tinggal masyarakat setempat. Pilih tempat pertemuan yang sentral dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat (dari segi jarak, tetapi juga yang tidak bersifat eksklusif, seperti gereja atau masjid; atau sebagian anggota masyarakat dapat merasa terasing di markas besar politik). Pertemuan di luar ruangan mungkin yang terbaik, asalkan ada cukup tempat teduh dan tempat duduk yang sesuai.

2. Publikasikan pertemuan tersebut kepada kaum perempuan dan terapkan strategi yang memastikan kehadiran perempuan dari berbagai latar belakang.

- Anjurkan para perempuan untuk mengajak teman-teman mereka ke pertemuan-pertemuan yang akan diadakan.
- Mintalah para suami untuk membawa istri dan anggota keluarga perempuan lainnya bersama mereka ke pertemuan.
- Kembangkan jejaring yang sudah ada atau kelompok-kelompok perempuan yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti kelompok bercocok tanam pohon dan kelompok kredit mikro.
- Jika memungkinkan, adakan sesi-sesi selanjutnya yang dipandu oleh perempuan untuk perempuan (dan sesi terpisah untuk kelompok-kelompok marginal lainnya) (lihat di bawah), tetapi pertama-tama adakan juga sesi dengan laki-laki agar mereka memahami alasannya. Pertimbangkan untuk melakukannya melalui organisasi lokal atau komunitas yang terpercaya.
- Sadari bahwa perempuan mungkin saja memiliki pandangan yang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kekayaan atau kemiskinan, pendidikan, dan latar belakang mereka—dan pastikan bahwa perempuan dari berbagai latar belakang ikut serta, termasuk perempuan penyandang disabilitas, perempuan migran, dan perempuan dari kelompok etnis atau minoritas lainnya.
- Pastikan bahwa bukan hanya perempuan yang sudah menikah yang hadir atau terwakili dalam pertemuan—wajibkan kehadiran dari atau atas nama janda, perempuan lajang, perempuan penyandang disabilitas, perempuan migran, dan perempuan dari kelompok etnis atau minoritas lainnya.
- Mendukung masyarakat dalam memutuskan apakah akan menetapkan kuota dan persyaratan kuorum sendiri untuk perempuan dan kelompok marginal (misalnya, kaum muda, peternak, penyandang disabilitas, migran, anggota kelompok etnis atau suku minoritas, dan keluarga miskin).

3. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi perempuan untuk hadir.

- Hindari menjadwalkan pertemuan saat wanita sedang menyiapkan makanan keluarga dan saat waktu makan.
- Sediakan dukungan yang memungkinkan perempuan untuk dapat menghadiri pertemuan, seperti menyediakan fasilitas penitipan anak di tempat pertemuan.

- Identifikasi perempuan yang memiliki kebutuhan khusus (seperti penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki tanggung jawab rumah tangga tambahan), dan berikan dukungan untuk memastikan keterlibatan mereka dalam pertemuan. Ini mungkin termasuk mengatur transportasi untuk perempuan yang tinggal jauh dari tempat pertemuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Ini juga dapat melibatkan intervensi lain seperti penerjemahan bahasa isyarat dan penggunaan mikrofon serta penguat suara.
- Mintalah saran dan bimbingan dari konsultan gender, pemandu lokal, dan organisasi hak-hak perempuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perempuan (baik karena kekerasan berbasis gender, konflik, atau militerisasi) jika mereka ingin berpartisipasi dalam pertemuan atau terlibat, menyampaikan pendapat, dan sekadar menegaskan kekuasaan mereka.
- Ambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan perempuan secara proaktif. Misalnya, pertimbangkan keamanan terkait opsi-opsi transportasi lokal, dan sarankan untuk bepergian dengan seorang teman lainnya guna mengantisipasi situasi-situasi yang berpotensi tidak aman. Mungkin perlu untuk menetapkan proses untuk mengidentifikasi kapan perempuan berisiko mengalami kekerasan dan membentuk mekanisme respons dan pengaduan yang sesuai, tidak hanya untuk partisipasi dalam pertemuan dan kegiatan lainnya, tetapi juga untuk dampak dari keputusan yang dibuat. Perlu dicatat bahwa tindakan pencegahan membutuhkan waktu dan sebaiknya dilakukan oleh para ahli (seperti LSM) yang dipekerjakan oleh tim yang terlibat.
- Bekerja sama dengan para pemimpin adat dan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan yang menghadiri pertemuan dan menyuarakan pendapat dilindungi dari kekerasan dan intimidasi.
- Dengan dukungan dari pemandu lokal, konsultan, dan organisasi perempuan, diskusikan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi setempat guna memastikan bahwa perempuan dapat hadir dalam jumlah besar di berbagai kegiatan. Dalam melakukannya, pertimbangkan pula interseksionalitas dan kendala kelangkaan sumber daya, dan pastikan untuk memahami jenis perempuan mana yang dilibatkan dan jenis perempuan mana yang dikecualikan (misalnya, karena kelas atau etnis). Pastikan Anda mengambil langkah-langkah untuk menyertakan dan melibatkan semua warga komunitas.

Memfasilitasi pertemuan seluruh komunitas.

1. Pastikan perempuan diberi kesempatan berbicara dalam rapat dan masukan mereka ditanggapi dengan serius.

- Buat agenda tetap yang membuka kesempatan kepada perempuan dan kelompok marginal untuk menyampaikan kekhawatiran dan berbagi gagasan mereka.
- Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi yang hanya diketahui oleh kaum perempuan, sehingga memerlukan partisipasi verbal perempuan dan menunjukkan pengetahuan serta keahlian mereka.
- Pastikan perempuan yang memimpin dalam mengumpulkan dan berbagi keahlian dan pengetahuan berbasis pengalaman mereka sendiri. Salah satu caranya adalah melalui kelompok diskusi: di tengah pertemuan, bagi peserta pertemuan menjadi kelompok diskusi yang terdiri dari laki-laki, perempuan, pemuda (dan subkelompok lain yang sesuai) untuk membahas poin-poin penting. Kemudian, setiap kelompok memilih juru bicara untuk melaporkan kembali hasil diskusi kelompok tersebut.
- Panggil perempuan untuk berbicara setidaknya sebanyak laki-laki. Fasilitator dapat mengamati ekspresi wajah perempuan untuk mencari pendapat yang kuat (bahkan jika mereka tidak mengangkat tangan) dan secara proaktif serta hormat meminta perempuan untuk berbicara. Fasilitasi adalah sebuah seni: Fasilitator dalam rapat harus terlatih dengan baik dan terampil dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berbicara dan membuat laki-laki mendengarkan, memahami, mempertimbangkan, dan mengambil tindakan untuk menerapkan pendapat, kekhawatiran, dan kontribusi perempuan.
- Jika perempuan lebih memilih seorang laki-laki untuk mewakili pandangan mereka dalam pertemuan komunitas, maka dukunglah perempuan untuk sepenuhnya menyampaikan pandangan mereka kepada

perwakilan yang mereka pilih. Bekerja sama dengannya untuk memastikan bahwa ia mewakili gagasan perempuan dengan benar dan dengan cara yang dianggap serius oleh masyarakat luas.

2. Pastikan perempuan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan komunitas dan keterlibatan dengan pihak luar.

- Bekerja sama dengan kepala suku, tetua adat, dan pemimpin agama agar mereka dapat turut mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat, dengan membingkai keahlian dan kearifan perempuan sebagai manfaat bagi seluruh komunitas.
- Saat pengambilan keputusan dalam pertemuan komunitas, perhatikan dengan saksama apakah perspektif, keahlian, minat, kekhawatiran, dan saran dari para perempuan telah didengar, dipertimbangkan, dan dimasukkan ke dalam keputusan dan rencana yang dihasilkan.
- Dukung komunitas untuk menyusun rencana dengan cermat tentang bagaimana mereka akan mengambil keputusan terkait dengan keterlibatan komunitas, terutama selama proses konsultasi dan negosiasi. Mendiskusikan semuanya terlebih dahulu dan menghasilkan rencana aksi umum dapat membantu membuat pengambilan keputusan lebih adil dan inklusif. Diskusi ini dapat membahas hal-hal berikut:
 - Siapa yang berhak memutuskan apakah suatu investasi atau proyek diterima, dan bagaimana interaksinya dengan masyarakat? Akankah semua warga, termasuk perempuan, kaum muda, dan anggota kelompok marginal diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan didengarkan? Apa yang akan terjadi jika kelompok minoritas tidak sepakat dengan kelompok mayoritas?
 - Bagaimana keputusan akan dibuat? Berapa persentase warga komunitas yang harus setuju? Apakah perempuan dan laki-laki akan memiliki hak suara?
 - Proses apa yang dapat diikuti masyarakat jika para pemimpin mereka atau tetua adat dan pemimpin tertentu lainnya setuju untuk mengalokasikan sejumlah besar tanah kepada pihak luar tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat? Strategi apa yang dapat dilakukan perempuan jika para pemimpin laki-laki membuat keputusan yang merampas hak perempuan atau menghambat akses mereka ke tanah yang mereka andalkan untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga mereka?
- Dukung dilakukannya diskusi-diskusi di seluruh komunitas tentang siapa yang seharusnya berada dalam tim negosiasi antara komunitas dan pihak luar. Tekankan bahwa perempuan memiliki keahlian dan pengetahuan yang berbeda dari laki-laki sebagai akibat dari pekerjaan mereka yang didominasi perempuan, dan bantu anggota komunitas memahami bahwa negosiasi apa pun akan tidak lengkap tanpa pengetahuan perempuan. Untuk memilih orang yang tepat untuk melakukan ini, komunitas dapat mengadakan pertemuan besar dan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - Akankah para tetua masyarakat, pemimpin terpilih, atau tim negosiasi khusus yang terdiri dari laki-laki, perempuan, pemuda, dan tetua yang dipilih secara khusus untuk peran tersebut mewakili komunitas?
 - Bagaimana tim negosiasi dapat mewakili semua kelompok pemangku kepentingan di masyarakat, sehingga pendapat semua anggota masyarakat dapat dipertimbangkan?
 - Kualitas, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan apa yang harus dimiliki anggota tim untuk memastikan perlindungan komprehensif terhadap kepentingan masyarakat?
- Dukung komunitas untuk melakukan segala upaya guna memastikan para pemimpin tidak mengadakan pertemuan pribadi dan rahasia dengan investor. Adakan diskusi komunitas terbuka mengenai masalah ini yang dirancang untuk membantu komunitas bertukar pikiran tentang strategi untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin dalam negosiasi publik.
- Dukung kaum perempuan untuk memilih pemimpin perempuan yang kuat yang dapat berbicara atas nama mereka dalam semua pertemuan tata kelola komunitas dan selama interaksi dengan pihak luar.

Mendukung pertemuan khusus perempuan

Ciptakan ruang khusus perempuan di mana mereka dapat dengan bebas mendiskusikan masalah, membangun kepercayaan diri, dan menyusun strategi, baik bersamaan dengan atau sebagai alternatif dari pertemuan dan

dialog campuran gender. Dalam pertemuan ini, fasilitator dapat 1) mengumpulkan lebih banyak informasi tentang masalah, ide, dan refleksi perempuan, dan 2) mendukung perempuan untuk berbicara lebih efektif dalam pertemuan seluruh komunitas. Pada intinya, pertemuan ini dapat menjadi forum untuk memberdayakan dan mempersiapkan perempuan untuk memperjuangkan diri mereka sendiri sebagai sebuah kelompok.

- Adakan pertemuan di mana perempuan bertemu dan berkumpul secara informal.
- Berikan pelatihan kepada para perempuan tentang hak-hak mereka—baik hak substantif maupun hak mereka untuk berperan aktif dalam tata kelola komunitas—dan informasi relevan terkait investasi. Pelatihan tersebut dapat mencakup hukum dan peraturan nasional serta kerangka hukum internasional yang melindungi hak perempuan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan komunitas.
- Berikan pelatihan dan bimbingan yang dirancang untuk mendukung perempuan agar 1) dapat berbicara secara efektif dalam rapat, 2) terlibat secara percaya diri dalam diskusi ekonomi dan keuangan terkait transaksi tanah, dan 3) memahami faktor risiko investasi dan mengadvokasi taktik pengurangan risiko.
- Dorong perempuan untuk membentuk kelompok perempuan yang menyampaikan presentasi kepada seluruh komunitas dalam pertemuan-pertemuan komunitas. Dukung perempuan untuk memilih perwakilan yang merasa nyaman berbicara atas nama mereka selama pertemuan yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan.
- Dorong dan dukung perempuan untuk maju dalam pemilihan untuk peran kepemimpinan dalam struktur tata kelola komunitas, serta menyediakan bimbingan dan pelatihan untuk mempersiapkan mereka menghadapi peran tersebut.

Alat 3. Sumber Hukum dan Praktik Baik untuk Inklusi Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas

Bagaimana menggunakan Alat 3

Alat ini merupakan bagian dari [Alat Panduan untuk Meningkatkan Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Keterlibatan Komunitas *nhancing*](#).^v Informasi tentang penggunaan kata dan konteks dapat ditemukan di bagian Pendahuluan perangkat panduan tersebut. Alat 3 dapat digunakan sebagai titik acuan untuk upaya advokasi yang mendukung partisipasi bermakna perempuan dalam keterlibatan komunitas.

Kewajiban / Aksi / Prinsip	Sumber atau Contoh
Undang-undang internasional & regional & praktik baik	
<p>harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk hak untuk mengakses informasi.</p> <p>Pemerintah harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan seperti kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Pembukaan dan pasal 2, 7 dan 19 • Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), pasal 2(1), 3 dan 19(2) • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), pasal 2(2) dan 3 • Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat (1981) (ACHPR), pasal 9.1 dan 18.3 • Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (1969), pasal 1.1 dan 13.1 • Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (1979)
<p>Masyarakat Adat dan Suku memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah mereka. Dalam kasus di mana Negara mempertahankan kepemilikan sumber daya mineral atau bawah permukaan atau hak atas sumber daya lain yang berkaitan dengan tanah, pemerintah harus menetapkan atau memelihara prosedur untuk berkonsultasi dengan masyarakat ini, dengan tujuan untuk memastikan apakah dan sejauh mana kepentingan mereka akan dirugikan sebelum melakukan atau mengizinkan program untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya tersebut yang berkaitan dengan tanah mereka. Apabila relokasi Masyarakat Adat dan Suku dianggap perlu, relokasi tersebut hanya boleh dilakukan dengan persetujuan yang bebas dan berdasarkan informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Konvensi Masyarakat Adat dan Suku (1989) (ILO 169), pasal 15 dan 16.2
<p>Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi di semua tingkatan pengambilan keputusan, dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan serta memperoleh manfaat darinya dan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol ACHPR tentang Hak-hak Perempuan di Afrika (2003), pasal IX.2 dan XIX.b – termasuk perempuan dengan disabilitas (pasal XXIII.a) • CEDAW, pasal 14.2(f)

^v Toolkit landing page: https://ccsi.columbia.edu/content/women_participation_toolkit.

Kewajiban / Aksi / Prinsip	Sumber atau Contoh
<p>Pemerintah harus mengakui hak kolektif perempuan adat atas tanah adat mereka dan mensyaratkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan sebelum mengizinkan proyek ekonomi, pembangunan, dan pertambangan di tanah dan wilayah mereka serta yang memengaruhi sumber daya alam mereka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CEDAW, Rekomendasi Umum No. 39 (2022) tentang hak-hak perempuan dan anak perempuan adat, paragraf 57
<p>Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan diperlukan dalam kasus relokasi Masyarakat Adat dari tanah mereka; sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat memengaruhi mereka; dan sebelum persetujuan proyek apa pun yang memengaruhi tanah atau wilayah dan sumber daya mereka lainnya, khususnya terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, atau eksploitasi mineral, air, atau sumber daya lainnya. Perhatian khusus perlu diberikan pada hak dan kebutuhan khusus perempuan Adat. Negara-negara diharuskan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan Adat menikmati perlindungan dan jaminan penuh terhadap semua bentuk kekerasan dan diskriminasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) (2007), pasal 10, 19, 22 dan 32.2
<p>Sebelum mengadopsi dan menerapkan proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi hak-hak petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan, Negara diwajibkan untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri: melibatkan dan mencari dukungan dari petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan yang dapat terpengaruh oleh keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat, dan menanggapi kontribusi mereka, dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuasaan antara berbagai pihak dan memastikan partisipasi aktif, bebas, efektif, bermakna, dan terinformasi dari individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan terkait.</p> <p>Negara juga diwajibkan untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan petani dan perempuan lain yang bekerja di daerah pedesaan dan untuk mendorong pemberdayaan mereka guna memastikan, atas dasar kesetaraan antara laki-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi PBB tentang Hak-hak Petani dan Orang yang Bekerja di Daerah Pedesaan (2018), pasal 2.3, 4 dan 10.1

Kewajiban / Aksi / Prinsip	Sumber atau Contoh
<p>laki dan perempuan, bahwa mereka sepenuhnya dan secara setara menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar serta mampu secara bebas mengejar, berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya pedesaan. Negara diwajibkan untuk memastikan bahwa perempuan petani dan perempuan lain yang bekerja di daerah pedesaan menikmati tanpa diskriminasi hak untuk berpartisipasi secara setara dan efektif dalam perumusan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di semua tingkatan; untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat; untuk akses yang sama terhadap, penggunaan, dan pengelolaan lahan dan sumber daya alam, dan untuk perlakuan yang sama atau prioritas dalam reformasi lahan dan agraria serta dalam skema pemukiman kembali lahan; dan untuk bebas dari semua bentuk kekerasan.</p>	
<p>Pemerintah harus mematuhi praktik baik internasional untuk memastikan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan transparansi.</p> <p>Setiap proyek yang memengaruhi sumber daya yang menjadi hak masyarakat harus memastikan partisipasi aktif, bebas, efektif, bermakna, dan terinformasi dari individu dan kelompok-kelompok dalam proses pengambilan keputusan terkait, dan bagi Masyarakat Adat, harus didasarkan pada konsultasi yang efektif dan bermakna untuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari mereka berdasarkan UNDRIP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk tujuan 5 • Panduan Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional , paragraph 3B.4, 3B.6, 3B.8, 4.4, 4.6, 9.2, 9.6, and 9.9
<p>Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia berdasarkan volunhukum internasional, termasuk juga hak-hak perempuan.</p> <p>Negara-negara harus memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan untuk menilai dan mengatasi kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual.</p> <p>Ketika perusahaan bisnis berpotensi dapat berdampak buruk terhadap perempuan adat, mereka harus mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk memberikan persetujuan atas informasi di awal tanpa paksaan, sebagaimana diatur dalam ILO 169 dan UNDRIP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM/United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (GPBHR), prinsip 7(b) dan 12 • Dimensi gender di dalam GPBHR (2019), aksi yang digambarkan dalam prinsip 12

Kewajiban / Aksi / Prinsip	Sumber atau Contoh
<p>Klien perlu melakukan proses konsultasi dan partisipasi yang terinformasi yang akan menghasilkan partisipasi yang terinformasi dari komunitas yang terdampak. Proses konsultasi harus (i) mencakup pandangan laki-laki dan perempuan, melalui forum atau keterlibatan terpisah jika perlu, dan (ii) mencerminkan kekhawatiran dan prioritas yang berbeda dari laki-laki dan perempuan tentang dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat, sebagaimana mestinya. Klien juga diharuskan untuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari komunitas Adat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> International Finance Corporation, Standar Kinerja, Penilaian dan Manajemen atas Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial, paragraf 31; PS 5 dan PS 7
Peraturan Dalam Negeri	
<p>Banyak negara memiliki hukum domestik yang melarang diskriminasi terhadap perempuan, mengakui hak asasi manusia perempuan, dan mewajibkan tindakan proaktif dari pemerintah untuk mewujudkan hak-hak tersebut.</p>	<p>Lihat, sebagai contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Hak Tanah Adat Sierra Leone (2022) menjamin hak untuk memiliki, memegang, menggunakan, mewarisi, menerima, atau mengelola tanah berdasarkan hukum adat bagi perempuan dan laki-laki secara setara, menyatakan bahwa setiap hukum adat yang mengecualikan, membatasi, atau menghambat perempuan untuk memiliki, memegang, menggunakan, mentransfer, mewarisi, menerima, atau mengelola tanah yang tunduk pada hukum adat adalah dinyatakan batal, menetapkan bahwa anggota masyarakat laki-laki dan perempuan dewasa dari suatu komunitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi anggota komite tanah, setidaknya 30% dari setiap komite tanah harus merupakan perempuan, dan komite tanah harus memastikan perlindungan dan penghormatan yang memadai terhadap hak-hak perempuan (pasal 5 dan 8). Anggota komunitas, khususnya perempuan dan pemuda, harus dilibatkan dalam konsultasi dan dilibatkan secara bermakna dalam proses yang mengarah pada penggusuran dan pemindahan lokasi pemukiman mereka (pasal 43.8). Undang-Undang Tanah Masyarakat Kenya (2022) menyatakan bahwa perempuan memiliki hak atas perlakuan yang sama dalam semua urusan tanah masyarakat dan bahwa setiap perempuan yang menikah dengan anggota komunitas masyarakat akan secara otomatis memperoleh keanggotaan komunitas tersebut (pasal 30). Undang-Undang Hak-Hak Perempuan Gambia (2010) secara tegas melarang diskriminasi terhadap perempuan dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam hal ini bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas. Setiap Kementerian, departemen pemerintahan, lembaga atau badan pemerintah khususnya diwajibkan untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan partisipasi penuh dan setara bagi perempuan termasuk dalam

Kewajiban / Aksi / Prinsip	Sumber atau Contoh
	<p>proyek-proyek pembangunan pedesaan. Undang-undang ini juga mengakui hak-hak perempuan atas properti, ketahanan pangan, perumahan yang layak, lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta pembangunan berkelanjutan. Lihat pasal 9, 10, 11, 14, 33, 48, 49, 51, 52, dan 54</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pertanahan Nasional Mozambik (BR 45/2022, 28 November 2022) mempromosikan dan menjamin akses terhadap tanah bagi perempuan, kaum muda, dan kelompok sosial yang terpinggirkan, sebagai mekanisme untuk mencapai kesetaraan, keadilan sosial, dan pemerataan (prinsip-prinsip dasar, poin 40.iv). • Untuk contoh lainnya, lihat publikasi ini: UN Women dan OHCHR, Mewujudkan Hak Perempuan atas Tanah dan Sumber Daya Produktif Lainnya (edisi ke-2), 2020
<p>Sejumlah Undang-undang Dasar atau Konstitusi di banyak negara tuan rumah menjamin hak akses terhadap informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bolivia (2009) (pasal 21.6) • Indonesia (1945, diamandemen pada tahun 2002) (pasal 28F) • Kenya (2010) (pasal 35) • Mozambik (2004, diamandemen pada tahun 2018) (pasal 4) • Afrika Selatan (1996, diamandemen pada tahun 2012) (pasal 32) • Uganda (1995, diamandemen pada tahun 2018) (pasal 41) • Zambia (1991, diamandemen pada tahun 2016) (pasal 173)
<p>Undang-undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan di beberapa negara juga telah menjamin hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bolivia: Undang-undang (2009) (pasal 3, 30(II)15, 32, 352 dan 403(I)). UUD Bolivia mewajibkan tercapainya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari seluruh lapisan populasi masyarakat yang terdampak, termasuk penduduk Afro-Bolivia dan Masyarakat Adat. • Chili: Ley N° 21.151 yang diundangkan pada 8 April 2019, memberikan pengakuan hukum kepada Penduduk Chili keturunan Afrika/<i>Afro-Chilean</i> (pasal 5). Undang-undang ini mengakui hak terkait Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan bagi masyarakat Chili keturunan Afrika. • Ekuador: Undang-undang Dasar (2008, diamandemen pada tahun 2021) (pasal 56 hingga 60) dan Undang-undang Partisipasi Publik yang mulai berlaku pada 20 April 2010 (pasal 81). Dibaca Bersama, UUD dan Undang-undang tersebut mengakui hak terkait Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan bagi Penduduk Ekuador keturunan Afrika dan Masyarakat Adat serta komunitas masyarakat lokal. • Nikaragua: Undang-undang Dasar (1987, diamandemen pada 2014) (pasal 5, 89, 91, dan 181), Undang-undang Otonomi bagi wilayah Pantai Atlantik Nikaragua/<i>Autonomy Statute for the Regions of the Atlantic Coast of Nicaragua</i> (UU 28) tertanggal 2 September 1987, Dekrit Majelis Nasional/<i>Decree of the National Assembly 3584</i> (Peraturan turunan dari

Kewajiban / Aksi / Prinsip	Sumber atau Contoh
	<p>UU No. 28) tertanggal 2 Oktober 2003, dan Undang-undang tentang Rezim Properti Milik Bersama Masyarakat di Pantai Karibia di Nikaragua/<i>Law of the Communal Property Regime of the Peoples of the Caribbean Coast of Nicaragua</i> (UU 445) yang diterbitkan pada 23 Januari 2003. Instrumen-instrumen ini, dibaca dengan dikaitkan dengan ILO 169, UNDRIP dan instrument-instrumen hak asasi manusia lainnya di mana Nikaragua merupakan negara pihak mewajibkan dicapainya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan bagi Masyarakat Adat dan Masyarakat keturunan Afrika.³⁰</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolombia: Hak-hak terkait Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan bagi komunitas-komunitas masyarakat keturunan Afrika diatur dalam sejumlah kerangka hukum, termasuk UUD (1991, diamandemen pada tahun 2015); UU No. 21 Tahun 1991 yang meratifikasi ILO 169; UU No. 70 Tahun 1993; UU No. 99 Tahun 1993 (pasal 76); Dekrit No. 1320 Tahun 1998, yang mengatur tentang konsultasi di awal dengan komunitas masyarakat Adat dan Kulit Hitam terkait eksploitasi sumber-sumber daya alam di dalam wilayah mereka; dan putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan No. T-576/14 tertanggal 4 Agustus 2014.³¹
<p>Undang-undang Dasar di banyak negara tuan rumah menjamin hak atas kesetaraan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Dasar Bolivia (2009) (pasal 14(II)) • Undang-undang Dasar Indonesia 1945, diamandemen pada tahun 2002) (pasal 27 dan 28I) • Undang-undang Dasar Kenya (2010) (pasal 27) • Undang-undang Dasar Mozambik (2004, diamandemen pada tahun 2018 (pasal 35, 36 dan 39) • Undang-undang Dasar Afrika Selatan (1996, diamandemen pada tahun 2023) (pasal 9) • Undang-undang Dasar Uganda (1995, diamandemen pada tahun 2017) (pasal 21) • Undang-undang Dasar Zambia (1991, diamandemen pada tahun 2016) (pasal 11 dan 23)
<p>Semakin banyak jumlah negara yang telah mengadopsi undang-undang yang mewajibkan bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan ketika berinvestasi di luar negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk Perancis (UU No. 2017-399 tertanggal 27 Maret 2017, tentang Kewajiban Perusahaan untuk Mengutamakan Kehati-hatian/<i>corporate duty of care</i>), Jerman (UU Rantai Pasok/<i>Supply Chain Law</i> tertanggal 22 Juli 2021) and Norwegia (UU Transparansi/<i>Transparency Law</i> tertanggal 10 Juni 2021). • Lihat juga: https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/mandatory-due-diligence
Standar-standar Industri	
<p>Semakin meningkat pula perusahaan-perusahaan investor yang memiliki standar-standar sendiri yang mengharuskan mereka untuk memastikan investasi mereka menghormati hak-hak perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contoh: Panduan Coca-Cola tentang Akuisisi Lahan yang Bertanggung Jawab dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan/<i>Free, Prior and</i>

Kewajiban / Aksi / Prinsip	Sumber atau Contoh
	<p><i>Informed Consent (FPIC)</i>^{vi}: “Entitas yang mengakuisisi lahan harus berkonsultasi dengan pemilik dan pengguna lahan yang mungkin terdampak oleh proyek tersebut. Memberdayakan masyarakat dan individu untuk secara bebas memilih perwakilan mereka sangat penting untuk memastikan partisipasi aktif mereka. Perhatian khusus diberikan pada keterlibatan perempuan dalam proses tersebut. [...] FPIC (<i>Free, Free, Informed Consent</i>/Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) mensyaratkan partisipasi penuh dan efektif dari perempuan yang terdampak oleh proyek tersebut. Meskipun mungkin ada tantangan dari aspek budaya yang harus diatasi, beberapa langkah sederhana dapat berdampak dramatis pada keterlibatan perempuan. Misalnya, tawarkan pertemuan khusus perempuan dan, jika memungkinkan, pastikan juga penerjemahnya adalah perempuan untuk mendorong konsultasi yang lebih mendalam dan efektif. Selain itu, pastikan tidak ada hambatan untuk berpartisipasi – seperti mengadakan konsultasi pada hari pasar ketika perempuan mungkin tidak dapat hadir.”</p>

^{vi} The Coca-Cola Company, Panduan tentang Akuisisi Lahan yang Bertanggung Jawab dan *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan* (2017), <https://www.coca-colacompany.com/content/dam/company/us/en/policies/pdf/human-workplace-rights/supplier-guiding-principles/responsible-land-aquisition-guidance-2017.pdf>.

Bibliografi

1. Kepustakaan

Agarwal, Bina, "Conceptualising Environmental Collective Action: Why Gender Matters," *Cambridge Journal of Economics* 24, no. 3 (2000): 283–310, <https://doi.org/10.1093/cje/24.3.283>.

Alvarado, Gina, and Caitlin Kieran, "To Protect Women and Uproot Patriarchy Means Confronting the Links Between Land and Gender-Based Violence," *Land Portal* (blog), 12 June 2022, <https://landportal.org/node/113178>.

Amparo Rodríguez, Gloria, "La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia," Grupo Semillas Colombia (Bogotá: Universidad del Rosario, 2008), <https://semillas.org.co/es/revista/la-consulta-previa-un-derecho-fundamental-de-los-pueblos-indigenas-y-grupos-tnicos-de-colombia>.

Bridges, Alexandra, Britany Zacharuk, and Johanna Tuglavina, *Indigenous Women's Participation in Impact Assessments: An Examination of Barriers in Impact Assessments and the Navigation of Violence to Land and Body* (Keepers of the Circle, 2023), <http://keepersofthecircle.com/assets-system/resources/Shared-Responsibilities.pdf>.

Beban, Alice, Joanna Bourke Martignoni, Sochanny Hak, Hue Le, Daovy Kongmanila, and Dien Thi Nguyen, *Towards Gender-Equitable Land Policy and Lawmaking in the Mekong Region* (Vientiane, Laos: Mekong Region Land Governance, 2024), <https://www.mrlg.org/publications/towards-gender-equitable-land-policy-and-lawmaking-in-the-mekong-region>.

Beban, Alice, Sochanny Hak, and Joanna Bourke-Martignoni, *Ensuring Gender-Equitable Consultations in Cambodia's Land and Agriculture Law and Policy* (Phnom Penh, Cambodia: Mekong Region Land Governance, 2024), https://www.mrlg.org/wp-content/uploads/2024/07/Policy-Brief-CAMBODIA-ENG_July-2024_Digital-1.pdf.

Buxton, Abbi, *Understanding Gender-Based Violence in Critical Mineral Mining* (London, England: International Institute for Environment and Development (IIED), 2025), <https://www.iied.org/22610iied>.

Chicago ALBA Solidarity, *Self-Determination of the Afro-Descendant People of Nicaragua: Report by Nicaragua's Office for the Defense of Human Rights* (2023), <https://chicagoalbasolidarity.org/2023/06/06/self-determination-of-the-afro-descendant-people-of-nicaragua>.

COLANDEF. *Women's Land, Property and Natural Resource Rights Challenges* (Accra, Ghana: 2025), <https://colandef.org/resources/women-s-land-property-and-natural-resources-rights-challenges>.

Créativité & Développement, *Accès Sécurisé Des Femmes Aux Ressources Foncières* (Boîte à Images, 2021), <https://www.codecguinee.org/2022/09/23/acces-securise-des-femmes-aux-ressources-foncieres/>.

Cultural Survival, First Peoples Worldwide, and Securing Indigenous Peoples' Rights in the Green Economy Coalition, *Securing Indigenous Peoples' Right to Self-Determination. A Guide on Free, Prior and Informed Consent* (Cultural Survival, 2023), https://www.culturalsurvival.org/news/new-guide-supports-indigenous-leaders-develop-fpic-protocols-and-secure-self-determined?gad_source=1&gad_campaignid=1442219742&gbraid=0AAAAAD9zhqwI5aOtFkGryz3nLW3EjzWPt&gclid=Cj0KCQiA_8TJBhDNARIsAPX5qxRzwSh1hszkWRg-sw3AtbXFUzBsHlgAVXoVyT8oVhzih6QLBf6Jad0aAvVEEALw_wcB.

Daley, Elizabeth, *Governing Land for Women and Men: A Technical Guide to Support the Achievement of Responsible Gender-Equitable Governance of Land Tenure* (Rome: Governance of Tenure Technical Guide no. 1, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013), <https://www.fao.org/4/i3114e/i3114e.pdf>.

Daley, Elizabeth, Jim Grabham, Yansanjav Narangerel, and Joyce Ndakaru, *Women and Community Land Rights: Investing in Local Champions* (Oxford, England: Mokoro Ltd, with HakiMadini (Tanzania) and PCC (Mongolia), 2021), https://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/Women-and-Community-Land-Rights_Investing-in-Local-Champions_WOLTS-2021.pdf.

Derechos en el Territorio, *Consulta previa para comunidades negras: Sentencia T-576 de 2014, Derechos en el Territorio* (Bogotá, Colombia: Corte Constitucional de Colombia, 2014), <https://derechosenelterritorio.com/temas/diversidad-etnica-y-cultural/t-576-2014>.

Dia Ibrahima, and Philippine Sutz, *Femmes et Foncier au Sénégal: Promouvoir une Gouvernance Inclusive et Participative* (London, England: IIED, 2023), <https://www.iied.org/fr/21366iied>.

European Commission, *Women's Land Rights Matter How EU Development Cooperation Can Help Close the Gender Gap in Land Tenure* (Brussels, Belgium: 2017), https://capacity4dev.europa.eu/library/technical-brief-womens-land-rights-matter-0_en?refpage=search.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, *The State of Food Security and Nutrition in the World 2019* (2019), <https://openknowledge.fao.org/items/f73edb75-4017-497b-8ca3-e66ea2109560>.

FPIC Solutions Dialogue, *Inclusivity and Gender in FPIC* (2020), <https://fpicdialogue.org/gender-and-inclusivity-in-fpic>.

Giovarelli, Renee, *RIPL Gender Primer* (Landesa, 2018), <https://ripllandesa.s3.us-west-2.amazonaws.com/Primers/RIPL+Gender+Primer+-+Final.pdf>.

Giovarelli, Renee, and Elisa Scalise, *Women's Land Tenure Framework for Analysis: Land Rights* (Landesa, 2013), https://www.landesa.org/wp-content/uploads/Land_Rights_Framework_2013March.pdf.

Götzmann, Nora, Tulika Bansal, Elin Wrzoncki, Cathrine Bloch Veiberg, Jacqueline Tedaldi, Roya Høvsgaard, Signe Andreasen Lysgaard, Dirk Hoffmann, Emil Lindbland Kernell, Ashley Nancy Reynolds, Francesca Thornberry, and Kayla Winarsky Green. *Cross-Cutting: Stakeholder Engagement: Human Rights Impact Assessment Guidance and Toolbox. The Danish Institute for Human Rights* (Copenhagen, Denmark: The Danish Institute for Human Rights, 2020), https://www.humanrights.dk/files/media/document/HRIA%20Toolbox_Stakeholder%20Engagement_ENG_2020.pdf.

Götzmann, Nora, and Nicholas Bainton, "Embedding Gender-Responsive Approaches in Impact Assessment and Management" *Impact Assessment and Project Appraisal* 39, no. 3 (2021), 171–182, <https://doi.org/10.1080/14615517.2021.1904721>.

Grueso Castelblanco and Libia Rosario, *El Derecho de Las Comunidades Afrocolombianas a La Consulta Previa, Libre e Informada: Una Guía de Información y Reflexión Para Su Aplicación Desde la Perspectiva de Los Derechos Humanos* (Naciones Unidas), <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7653.pdf>.

Human Rights Clinic (Columbia Law School) and International Human Rights Clinic (Harvard Law School). *Righting Wrongs? Barrick Gold's Remedy Mechanism for Sexual Violence in Papua New Guinea: Key Concerns and Lessons Learned* (2015), <https://static1.squarespace.com/static/562e6123e4b016122951595f/t/565a12cde4b0060cdb69c6c6/1448743629669/Righting+Wrongs.pdf>.

Ibnouf, Fatma Osman. "The Role of Women in Providing and Improving Household Food Security in Sudan: Implications for Reducing Hunger and Malnutrition," *Journal of International Women's Studies* 10, no. 4 (2009): 144–167, <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol10/iss4/10>.

Keene, Stephanie, Isabel Davila Pereira, and Chloe Ginsburg. *Resilience and Resistance: Indigenous, Afro-Descendant, and Local Community Women's Statutory Rights to Community Forests* (Rights and Resources Initiative, 2025), <https://doi.org/10.53892/QSTZ6441>.

Kemp, Deanna, Sandy Worden, and John R. Owen, Differentiated Social Risk: Rebound Dynamics and Sustainability Performance in Mining, *Resources Policy* 50 (2016): 19–26, doi: 10.1016/j.resourpol.2016.08.00.

Knight, Rachael, Judy Adoko, Teresa Auma, Ali Kaba, Alda Salomao, Silas Siakor, and Issufo Tankar, *Protecting Community Lands and Resources: Evidence From Liberia, Mozambique and Uganda* (Namati, 2012), https://namati.org/wp-content/uploads/2023/09/protecting_community_lands_resources_Final_LR.pdf.

Knight, Rachael, Marena Brinkhurst, and Jaron Vogelsang, *Community Land Protection Facilitators Guide* (Namati, 2017), <https://grassrootsjusticenetwork.org/resources/community-land-protection-facilitators-guide>.

Knight, Rachael, Kaitlin Y. Cordes, Sam Szoke-Burke, Tehtena Mebratu-Tsegaye, and Marena Brinkhurst, *Preparing in Advance for Potential Investors Guide 1: For Community Members and Advocates Interacting With Potential Investors* (CCSI), <https://ccsi.columbia.edu/sites/ccsi.columbia.edu/files/content/docs/our%20focus/guide%201.pdf>.

Knight, Rachael, Samuel Nguiffo, Teresa Auma Eilu, Lorenzo Cotula, and Doreen Kobusingye. *Are Community-Investor Conflicts Inevitable? Community Legal Empowerment and Conflict Prevention Experiences From Cameroon and Uganda* (London: IIED, 2025), <https://www.iied.org/22640iied>.

Knight, Rachael, Jaron Vogelsang, and Marena Brinkhurst, *Valuation of Community Lands and Natural Resources* (Namati, 2017), <https://grassrootsjusticenetwork.org/wp-content/uploads/2017/01/Valuation-CLP-Guide.pdf>.

Kropiwnicka, Magdalena Anna, and Barbara Van Paassen, *The Gendered Impacts of Large-Scale Land Based Investments and Women's Responses* (Trócaire, 2020), https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/the_gendered_impacts_of_large-scale_land_based_investments_and_womens_responses_-_scoping_study.pdf.

Lkhamdulam, N., Y. Narangerel, and E. Daley. *Guidelines for Public Consultations on Soum Land Management in Mongolia*, (United Kingdom: Mokoro Ltd. And PCC Mongolia, 2019), https://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/Guidelines-for-Public-Consultations-on-Soum-Land-Management-in-Mongolia_final-English-version_2021.pdf.

Loutit, Jennifer, Jacqueline Mandelbaum, and Sam Szoke-Burke. Emerging Practices in Community Development Agreements, *Journal of Sustainable Development Law and Policy* 7, no. 1 (2016): 64–96, <http://www.ajol.info/index.php/jsdlp/article/view/140513>.

Mbaya, Sue, *Training of Trainers Module: Gender-Sensitive Community Engagement in Large-Scale Land-Based Investments in Agriculture* (PLAAS, Oxfam, and PROPAC, 2019), https://cng-cdn.oxfam.org/panafrica.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/ToT%20Manual%20REPRO%20WEB_7.pdf.

McDougall, Cynthia, Marlène Elias, and Annet Mulema, *The Potential and Unknowns of Gender Transformative Approaches - CGIAR GENDER PLATFORM Evidence Explainer* (Nairobi, Kenya: CGIAR GENDER Platform, 2021), <https://hdl.handle.net/10568/114804>.

Mullins, Dan, and Justus Wambayi. Testing Community Consent: Tullow Oil Project in Kenya (Oxfam International, 2017), <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/10546/620362/1/bp-testing-community-consent-tullow-oil-kenya-081117-en.pdf>.

Oxfam and International Institute for Sustainable Development, *Enabling Voices, Demanding Rights: A Guide to Gender-Sensitive Community Engagement in Large-Scale Land-Based Investment in Agriculture* (Oxfam International, 2018), <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/10546/620474/1/gd-enabling-voices-demanding-rights-land-250518-en.pdf>.

Osorio, Martha, and Ambra Gallina. *Gender Opportunities and Constraints in Land-Related Agricultural Investments* (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018), <https://www.fao.org/3/ca0182en/CA0182EN.pdf>.

Porgera Women's Rights Watch (Everlyn Gaupe), Atali Tange Association Inc (Lely Kesa), Porgera Red Wara (River) Women's Association (Cressida Kuala), and Ipili Indigenous SML Women's Association (Joycelyn David Mandi), *Disproportionate Impacts of Business Activities on Women: Lessons From Papua New Guinea to Inform Gender Guidance to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (2018), https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/Gender/PNG_Columbia.pdf.

Nguyen Quy Nghi, Nguyen Thi Minh Phuong, and Do Thi Le Hang, Gender Biases in Resettlement Processes in Vietnam: Examining Women's Participation and Implications for Impact Assessment, *Impact Assessment and Project Appraisal* 39, no. 3 (2021): 206–217,

<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/be602741-d75d-5759-a418-7984394069b3/content>.

Resource Equity, *Gender, Land, and Extractive Development: Issues and Opportunities for Improved Understanding and Practice* (2017), https://landwise-production.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022/03/Resource-Equity_Gender-Land-Extractive-Development_2018-1.pdf.

Rio Tinto, *Why Gender Matters: A Resource Guide for Integrating Gender Considerations Into Communities Work at Rio Tinto* (2009), https://www.csr.mq.edu.au/media/docs/171/Why_Gender_Matters.pdf.

Roberts, Beth. *Vulnerable Groups Primer* (Landesa, 2018). <https://riplandesas3.us-west-2.amazonaws.com/Primers/RIPL+Vulnerable+Groups+Primer+-+Final.pdf>.

Salcedo-La Viña, Celine, *Beyond Title: How to Secure Land Tenure for Women* (World Resources Institute, 2020), <https://www.wri.org/insights/beyond-title-how-secure-land-tenure-women>.

Salcedo-La Viña, Celine, *Why Are Women Left Out of Land Decisions, Despite Gender Equity Laws?* (World Resources Institute, 2016), <https://www.wri.org/insights/why-are-women-left-out-land-decisions-despite-gender-equity-laws>.

Salcedo-La Viña, Celine, and Maitri Morarji. *Making Women's Voices Count In Community Decision-Making on Land Investments* (World Resources Institute, 2016), <https://www.wri.org/research/making-womens-voices-count-community-decision-making-land-investments>.

Salcedo-La Viña, Celine, and Laura Notess, *A Fair Share for Women: Toward More Equitable Land Compensation and Resettlement in Tanzania and Mozambique* (World Resources Institute, 2018), <https://www.wri.org/research/fair-share-women-toward-more-equitable-land-compensation-and-resettlement-tanzania-and>.

Salomão, Alda Isabel Aníbal, *Land-Based Investments in Mozambique: Challenges in Community Rights Protection, Participation and Benefit Sharing* (Utrecht University, 2020), <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/397377>.

Singh, Sujit Kumar, and Vikrant Wankhede, *Inclusion of Gender in Environment Impact Assessment* (Centre for Science and the Environment, 2018), <https://www.nema.go.ke/images/Docs/Guidelines/Inclusion%20of%20Gender%20in%20Environment%20Impact%20Assessment.pdf>.

Sutz, Philippine, Emile Beauchamp, and Anna Bolin, *Routes to Change: Rural Women's Voices in Land, Climate and Market Governance in Sub-Saharan Africa* (London, England: IIED, 2021), <https://www.iied.org/20331iied>.

Sutz, Philippine, Amaelle Seigneret, Mary Richard, Patricia Blankson Akapko, Fati Alhassan, and Mamadou Fall, *A Stronger Voice for Women in Local Land Governance: Effective Approaches in Tanzania, Ghana and Senegal* (IIED, 2019), <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/17653IIED.pdf>.

Tagliarino Nicholas K., "The Status of National Legal Frameworks for Valuing Compensation for Expropriated Land: An Analysis of Whether National Laws in 50 Countries/Regions Across Asia, Africa, and Latin America Comply With International Standards on Compensation Valuation," *Land* 6, no. 2 (2017): 37, <https://doi.org/10.3390/land6020037>.

"Training for Gender Equality and Women's Empowerment", UN Women, <https://www.unwomen.org/en/how-we-work/capacity-development-and-training>.

UN Women and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Realizing Women's Rights to Land and Other Productive Resources (Second Edition)* (United Nations, 2020), <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/10/realizing-womens-rights-to-land-and-other-productive-resources-2nd-edition>.

Villamor, Grace B., Meine van Noordwijk, Utkur Djanibekov, Ma Elena Chiong-Javier, and Delia "Catacutan, Gender Differences in Land-Use Decisions: Shaping Multifunctional Landscapes?" *Current Opinion in Environmental Sustainability* 6 (2014): 128–133, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.11.015>.

Wakesho, Eileen, and Shona Hawkes, *Women's Rights From the Ground Up* (Oxfam International, 2020), <https://www.oxfam.org/en/research/womens-rights-ground>.

Williams, Quimera, and María Faciolince Martina. *Braided Justice: Gender Transformative Approaches to Legal Empowerment for Land, Environmental, and Climate Justice* (Grassroots Justice Network, 2025), <https://grassrootsjusticenetwork.org/resources/braided-justice-gender-transformative-approaches-to-legal-empowerment-for-land-environmental-and-climate-justice>.

Women to Kilimanjaro, *Charter of Demands: Actualizing Women's Land Rights in Africa* (Women's Learning Partnership, 2016), <https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/WOMEN%20TO%20KILIMANJARO-%20CHARTER%20OF%20DEMANDS.pdf>.

WoMin Collective, "Extractives vs Development Sovereignty: Building Living Consent Rights for African Women," *Gender & Development* 25, no. 3 (2017): 421–437, doi:10.1080/13552074.2017.1379782.

Wong Pérez, Karen, Susannah Fisher, Tracy Kajumba, Barry Smith, Emile Beauchamp, Sam Greene, Clare Shakya, Anna Walnycki, Beth Chitekwe-Biti, Ariana Karamallis, Rose Wamalwa, Hajira C. Mukasa, David Silakan, and Margaret Arnold, *Engaging citizens for socially just climate action*, (Washington, DC: World Bank, 2022), <https://www.iied.org/22256g>.

2. Perjanjian, instrument dan standar internasional

(per tanggal adopsi, yang teratas adalah yang terbaru)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, General Recommendations No. 39 (2022) on Rights of Indigenous Women and Girls, paragraph 57 (2022)/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum No. 39 (2022) tentang hak-hak perempuan dan anak perempuan adat, paragraf 57 (2022)

Gender dimensions in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (2019)/ Dimensi-dimensi gender dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (2019)

UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (2018)/Deklarasi PBB tentang Hak-hak Petani dan Orang yang Bekerja di Daerah Pedesaan (2018)

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015)/Mentranformasi dunia kita: Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan untuk 2030 (2015)

International Finance Corporation, Performance Standard, Standards on Environmental and Social Sustainability (2012)/International Finance Corporation, Standar Kinerja, Standar tentang Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Sosial (2012)

Voluntary Guidelines for Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of National Food Security (2012)/ Panduan Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (2012)

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)/Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (2011)

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007)/Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (2007)

Protocol to the African Charter on Human and People's Rights (ACHPR) on the Rights of Women in Africa (2003)/Protokol ACHPR tentang Hak-hak Perempuan di Afrika (2003)

Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169) of the International Labour Organization (1989)/Konvensi International Labour Organization (ILO) (1989) tentang Konvensi Masyarakat Adat dan Suku (No. 169)

African Charter on Human and Peoples' Rights (1981)/Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Masyarakat (1981)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)

American Convention on Human Rights (1969)/Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia (1969)

International Covenant on Civil and Political Rights (1966)/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)

Universal Declaration of Human Rights (1948)/Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (1948)

3. Peraturan perundang-undang dan kebijakan nasional

Bolivia Undang-undang Dasar (2009)

Chili Ley N° 21.151 tertanggal April 8, 2019, mengukuhkan pengakuan hukum terhadap Masyarakat Keturunan Afro-Chili

Kolombia Undang-undang Dasar (1991, diamandemen tahun 2015); Law 21, tahun 1991 yang meratifikasi ILO 169; UU 70 Tahun 1993; UU 99 Tahun 1993; Dekrit 1320 Tahun 1998 mengatur tentang konsultasi yang dilakukan Bersama komunitas masyarakat Adat dan Kulit Hitam untuk hal-hal terkait eksploitasi sumber daya alam yang berada di wilayah mereka

Ekuador Undang-undang Dasar (2008, diamandemen tahun 2021); UU Partisipasi Publik 20 April 2010

Perancis UU 2017-399 27 Maret 2017, tentang kewajiban perusahaan untuk mengutamakan kehati-hatian

Gambia UU Hak-hak Perempuan 2010

Jerman UU Rantai Pasok 22 Juli 2021

Indonesia Undang-undang Dasar (1945, diamandemen tahun 2002)

Kenya Undang-undang Dasar (2010); UU Tanah Masyarakat (2022)

Mozambik Undang-undang Dasar (2004, diamandemen tahun 2018); Kebijakan Tanah Nasional (BR 45/2022) 28 November 2022

Nikaragua Undang-undang Dasar (1987, diamandemen tahun 2014); Peraturan Otonomi untuk Wilayah-wilayah Pantai Nikaragua (UU 28) 2 September 1987; Dekrit Majelis Nasional 3584 (Peraturan pada UU No. 28) 2 Oktober 2003; dan UU Rezim Properti Umum dari Masyarakat di Pantai Karibia di Nikaragua (UU 445) diterbitkan pada 23 Januari 2003.

Norwegia UU Transparansi 10 Juni 2021

Sierra Leone UU Hak-hak atas Tanah Adat 23 September 2022

Afrika Selatan Undang-undang Dasar (1996, diamandemen tahun 2023)

Uganda Undang-undang Dasar (1995, diamandemen tahun 2017)

Zambia Undang-undang Dasar (1991, diamandemen tahun 2016)

4. Kasus-kasus nasional

Mahkamah Konstitusi Kolombia, 4 Agustus 2014, Putusan T-576/14

Catatan Kaki

¹ Laman alat: https://ccsi.columbia.edu/content/women_participation_toolkit.

² Resource Equity, 'Gender, Land, and Extractive Development: Issues and Opportunities for Improved Understanding and Practice', 10 November 2017, sec. 3.2, https://landwise-production.s3.amazonaws.com/2022/03/Resource-Equity_Gender-Land-Extractive-Development_2018-1.pdf.

³ Untuk melihat ikhtisar tentang jenis-jenis investor ekonomi nyata dan investor finansial dan tautan-tautan terkait secara terperinci, lihat Grace Brennan, 'A Launchpad for Deeper Analysis into the Business Case for Respecting Human Rights in Land-Based Investments', *Columbia Center on Sustainable Investment Blog* (blog), 18 June 2025, <https://ccsi.columbia.edu/news/launchpad-deeper-analysis-business-case-respecting-human-rights-land-based-investments>.

⁴ Rachael Knight, Marena Brinkhurst, and Jaron Vogelsang, *Community Land Protection Facilitators Guide* (Namati, 2017), 34–35, https://grassrootsjusticenetowork.org/wp-content/uploads/2016/02/Namati-Community-Land-Protection-Facilitators-Guide_Ed.2-2017-LR.pdf.

⁵ Lihat Alat 3 dalam Perangkat ini: *Sources of Law and Good Practice for Women's Inclusion in Community Engagements*.

⁶ *Ibid.* and Kelly Dudine and Sam Szoke-Burke, *Government Briefing: Incorporating Free, Prior and Informed Consent into Investment Approval Processes* (New York: CCSI, 2020), <https://ccsi.columbia.edu/content/government-briefing-incorporating-free-prior-and-informed-consent-fpic-investment-approval>; Stephanie Keene, Isabel Davila Pereira, and Chloe Ginsburg, 'Resilience and Resistance: Indigenous, Afro-Descendant, and Local Community Women's Statutory Rights to Community Forests', 2025, <https://doi.org/10.53892/QSTZ6441>. Note that Afro-descendant Peoples recently gained international recognition. The role that they play in conserving biodiversity and in the implementation of the Convention on Biological Diversity was recently recognised (see Decision 16/6 adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity on November 1, 2024. Role of people of African descent, comprising collectives embodying traditional lifestyles, in the implementation of the Convention on Biological Diversity (CBD/COP/DEC/16/6)).

⁷ Jennifer Loutit, Jacqueline Mandelbaum, and Sam Szoke-Burke, 'Emerging Practices in Community Development Agreements' (CCSI, 26 July 2016), <http://www.ajol.info/index.php/jsdlp/article/view/140513>; CCSI and CIRDI, 'Open Community Contracts', 2018, <https://opencommunitycontracts.org/>.

⁸ Untuk penjelasan tentang apa yang disebut dengan *Jesse Coleman and Anna Bulman, Investment frameworks and responsible land-based investments: Illustrating points of contact* (IIED; ALIGN, Forthcoming).

⁹ See for example, Julia Behrman, Ruth Meinzen-Dick, and Agnes Quisumbing, 'The Gender Implications of Large-Scale Land Deals', *The Journal of Peasant Studies* 39, no. 1 (January 2012): 49–79; Leslie Hannay, 'What Do We Know about Gender and Large-Scale Land Acquisitions? | Land Portal', Land Portal Blog (blog), accessed 5 November 2025, https://landportal.org/blog-post/2024/10/what-do-we-know-about-gender-and-large-scale-land-acquisitions?utm_source=chatgpt.com; Magdalena Anna Kropiwnicka and Barbara Van Paassen, 'The Gendered Impacts of Large-Scale Land Based Investments and Women's Responses' (Trócaire, 9 July 2020), https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/the_gendered_impacts_of_large-scale_land_based_investments_and_womens_responses_-_scoping_study.pdf; Jemima Opare-Henaku, 'The Effects of Large-Scale Land Acquisitions on Women', *Rights and Resources Blog* (blog), 2/6/17, https://rightsandresources.org/blog/effects-large-scale-land-acquisitions-women/?utm_source=chatgpt.com.

¹⁰ See more Nora Götzmann and Nicholas Bainton, 'Embedding Gender-Responsive Approaches in Impact Assessment and Management', *Impact Assessment and Project Appraisal* 39, no. 3 (4 May 2021): 174–75, <https://doi.org/10.1080/14615517.2021.1904721>; Cultural Survival, First Peoples Worldwide, and Securing Indigenous Peoples' Rights in the Green Economy (SIRGE) Coalition, *Securing Indigenous Peoples' Right to Self-Determination: A Guide on Free Prior and Informed Consent* (SIRGE Coalition, 2023), 34, <https://www.culturalsurvival.org/news/new-guide-supports-indigenous-leaders-develop-fpic-protocols-and-secure-self-determined>.

¹¹ Götzmann and Bainton, 'Embedding Gender-Responsive Approaches in Impact Assessment and Management', 175; Human Rights Clinic (Columbia Law School) and International Human Rights Clinic (Harvard Law School), 'Righting Wrongs? Barrick Gold's Remedy Mechanism for Sexual Violence in Papua New Guinea: Key Concerns and Lessons Learned', November 2015, <https://static1.squarespace.com/static/562e6123e4b016122951595f/t/565a12cde4b0060c6b69c6c6/1448743629669/Righting+Wrongs.pdf>.

¹² Evidence shows that meaningful participation of women in community engagements leads to positive outcomes, especially when coupled with interventions that focus on the enabling environment such as secure land tenure, legal recognition, and awareness raising. See for example, Kropiwnicka and Paassen, 'The Gendered Impacts of Large-Scale Land Based Investments and Women's Responses'; Peter Cronkleton et al., 'Using Participatory Approaches to Enhance Women's Engagement in Natural Resource Management in Northern Ghana', *Sustainability* 13, no. 13 (January 2021): 7072, <https://doi.org/10.3390/su13137072>; Celine Salcedo-La Viña, '3 Benefits of Women's Collective Land Rights', *World Resources Institute Blog* (blog), 18–2 August 2021, <https://www.wri.org/insights/3-benefits-womens-collective-land-rights>; Philippine Sutz Deborah Rubin, 'Supporting an Enabling Legal Environment for Women's Empowerment in Food and Agriculture' (FAO, September 2021), <https://www.iied.org/20516x>.

¹³ A "gender transformative" approach or action "transforms the underlying power imbalances in society, and promotes

the leadership of women, members of the LGBTIQ+ community and other structurally marginalized groups.” Marta Almela Menjón, María Atuesta, and Jacqueline Sofia, *How To: Design and Implement a Gender-Transformative Action Research Project* (Grassroots Justice Network, n.d.), 2, <https://namati.org/wp-content/uploads/2024/08/How-To-Guide-on-PAR-English.pdf>; María Faciolince Martina et al., *Braided Justice: Gender Transformative Approaches to Legal Empowerment for Land, Environmental, and Climate Justice* (Namati, 2024), 35, <https://grassrootsjusticenetwork.org/resources/braided-justice-gender-transformative-approaches-to-legal-empowerment-for-land-environmental-and-climate-justice/>.

¹⁴ See for example, Knight, Brinkhurst, and Vogelsang, *Community Land Protection Facilitators Guide*, 33–34.

¹⁵ Adapted from: Interagency Gender Working Group, ‘Gender Integration Continuum’ (USAID, n.d.), https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/IGWG_2017_Gender-Integration-Continuum.pdf; Evaluation Office and Gender Section, *UNICEF Guidance on Gender Integration in Evaluation* (New York: UNICEF, 2019), <https://www.unicef.org/evaluation/media/1221/file/UNICEF%20Guidance%20on%20Gender.pdf>; Independent Evaluation Office, *The Gender Results Effectiveness Scale (GRES): A Methodology Guidance Note* (UNDP, n.d.), https://erc.undp.org/pdf/GRES_English.pdf; Faciolince Martina et al., *Braided Justice: Gender Transformative Approaches to Legal Empowerment for Land, Environmental, and Climate Justice*, 34; Nick Ross, *A Practical Guide to a Gender-Inclusive National Dialogue* (Geneva: Inclusive Peace, 2022), <https://www.inclusivepeace.org/wp-content/uploads/2023/03/National-Dialogues-final-Inclusive-Peace-Mar2023-UNW.pdf>.

¹⁶ See for example, FPIC Solutions Dialogue, ‘*Inclusivity and Gender in FPIC*’, FPIC Solutions Dialogue, 10 March 2020, <https://fpicdialogue.org/gender-and-inclusivity-in-fpic/>.

¹⁷ Grace B Villamor et al., ‘Gender Differences in Land-Use Decisions: Shaping Multifunctional Landscapes?’, *Current Opinion in Environmental Sustainability* 6 (2014): 130, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.11.015>.

¹⁸ Women’s Act, 2010 (The Gambia) section 33(1)(a). See for example, FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World 2019* (FAO, 2019), 101, Box 15, <https://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf>; Fatma Osman Ibnouf, ‘The Role of Women in Providing and Improving Household Food Security in Sudan: Implications for Reducing Hunger and Malnutrition’, *Journal of International Women’s Studies* 10, no. 4 (1 September 2013): 144–67, <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol10/iss4/10>; Resource Equity, ‘*Gender, Land, and Extractive Development: Issues and Opportunities for Improved Understanding and Practice*’, sec. 2.3.4.

¹⁹ Celine Salcedo-La Viña, ‘*Beyond Title: How to Secure Land Tenure for Women*’ (WRI, 3 March 2020), <https://www.wri.org/insights/beyond-title-how-secure-land-tenure-women>.

²⁰ Anna Locke et al., *Assessing the Costs of Tenure Risks to Agribusinesses* (TMP Systems and ODI, 2019), https://www.landgovernance.org/assets/QTR_Report-Assessing-the-costs-DIGITAL_1.pdf. See also Nguyen Quy Nghi, Nguyen Thi Minh Phuong, and Do Thi Le Hang, ‘Gender Biases in Resettlement Processes in Vietnam: Examining Women’s Participation and Implications for Impact Assessment’, *Impact Assessment and Project Appraisal* 39, no. 3 (5 April 2021): 206–17, <https://doi.org/10.1080/14615517.2021.1904376> citing Deanna Kemp, Sandy Worden, and John R. Owen, ‘Differentiated Social Risk: Rebound Dynamics and Sustainability Performance in Mining’, *Resources Policy* 50 (12 January 2016): 19–26, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.08.004>.

²¹ For example, two companies in connection with the East African Crude Oil Pipeline Project in Uganda and Tanzania and a sugar investor in Cambodia: Inclusive Development International, ‘*Cambodia: Communities Reach Resolution with Mitr Phol*’, n.d., <https://www.inclusivedevelopment.net/cases/mitr-phol/>; ‘Uganda & Tanzania: East African Crude Oil Pipeline (EACOP)’, Business & Human Rights Resource Centre, 23 May 2025, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/uganda-tanzania-east-african-crude-oil-pipeline-eacop/>.

²² B Agarwal, ‘Conceptualising Environmental Collective Action: Why Gender Matters’, *Cambridge Journal of Economics* 24, no. 3 (5 January 2000): 283–310, <https://doi.org/10.1093/cje/24.3.283>; Philippine Sutz, Emilie Beauchamp, and Anna Bolin, *Routes to Change: Rural Women’s Voices in Land, Climate and Market Governance in Sub-Saharan Africa* (London: IIED, 2021), <https://www.iied.org/20331iied>; Ibrahima Dia and Philippine Sutz, *Femmes et foncier au Sénégal : promouvoir une gouvernance inclusive et participative* (London: IIED, 2023), <https://www.iied.org/fr/21366iied>.

²³ Sebagai contoh penggambaran, Afrika Selatan mewajibkan bahwa hukum adat untuk diterapkan “sedemikian rupa sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar,” yang termasuk hak atas kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Bagian 39 Undang-undang Dasar mengatur bahwa semua hukum, baik itu perundang-undangan, hukum umum, atau hukum adat, harus dikembangkan dengan menyelaraskan dengan “semangan, maksud, dan tujuan” dari UUD tentang Hak-hak. Contohnya, terkait dengan kasus “Bhe” di Afrika Selatan, pengadilan menolak untuk menegakkan ketentuan dalam hukum adat yaitu hanya anggota keluarga yang laki-laki yang memiliki hak waris dan memerintahkan bahwa ketentuan tersebut hendaknya dibuat agar selaras dengan hak-hak atas kesetaraan.

²⁴ Agarwal, ‘Conceptualising Environmental Collective Action’.

²⁵ Knight, Brinkhurst, and Vogelsang, *Community Land Protection Facilitators Guide*, 115 and 116.

²⁶ Rachael Knight et al., *Protecting Community Lands and Resources: Evidence from Liberia, Mozambique and Uganda* (Namati and ILDO, 2012), <https://namati.org/publications/protecting-community-lands-and-resources-evidence-from-liberia-mozambique-and-uganda/>; Elizabeth Daley and Food and Agriculture Organization of the United Nations, eds., *Governing Land for Women and Men: A Technical Guide to Support the Achievement of Responsible Gender-Equitable Governance of Land Tenure*, Governance of Tenure Technical Guide, no. 1 (Rome: FAO, 2013), <https://www.fao.org/4/i3114e/i3114e.pdf>.

²⁷ Philippine Sutz et al., *A Stronger Voice for Women in Local Land Governance: Effective Approaches in Tanzania, Ghana and Senegal* (IIED, 2019), <https://www.iied.org/17653iied>.

²⁸ Abbi Buxton, *Understanding Gender-Based Violence in Critical Mineral Mining* (London: IIED, 2025), <https://www.iied.org/22610iied>.

²⁹ European Commission, 'Women's Land Rights Matter How EU Development Cooperation Can Help Close the Gender Gap in Land Tenure', 2017, https://capacity4dev.europa.eu/library/technical-brief-womens-land-rights-matter-0_en?refpage=search.

³⁰ Sutz, Beauchamp, and Bolin, *Routes to Change*, 40; Eileen Wakesho and Shona Hawkes, *Women's Rights from the Ground Up* (Oxfam International, n.d.), https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/English_WLR_StrategyApproach_20200619_Final.pdf; Celine Salcedo-La Viña and Maitri Morarji, 'Making Women's Voices Count In Community Decision-Making On Land Investments', Working Paper, July 2016, <https://www.wri.org/research/making-womens-voices-count-community-decision-making-land-investments>; European Commission, 'Women's Land Rights Matter How EU Development Cooperation Can Help Close the Gender Gap in Land Tenure'; see Namati's 'bootcamps': Faciolince Martina et al., *Braided Justice: Gender Transformative Approaches to Legal Empowerment for Land, Environmental, and Climate Justice*, 59.

³¹ Celine Salcedo-La Viña and Maitri Morarji, 'Making Women's Voices Count In Community Decision-Making On Land Investments', World Resources Institute, 28 July 2016, <https://www.wri.org/research/making-womens-voices-count-community-decision-making-land-investments>.

³² The villages were Mhaga, Vilabwa, Marumbo and Kidugalo. Philippine Sutz, Amaelle Seigneret, Mary Richard, Patricia Blankson Akapko, Fati Alhassan, Mamadou Fall, 'A Stronger Voice for Women in Local Land Governance: Effective Approaches in Tanzania, Ghana and Senegal' (London: International Institute for Environment and Development, 2019), <https://www.iied.org/17653iied>.

³³ Knight, Brinkhurst, and Vogelsang, *Community Land Protection Facilitators Guide*, 33, 115.

³⁴ Faciolince Martina et al., *Braided Justice: Gender Transformative Approaches to Legal Empowerment for Land, Environmental, and Climate Justice*, 59.

³⁵ Sebagai contoh, manfaat-manfaat ini seringkali tidak dipertimbangkan dalam kompensasi ketika ada pembelian lahan. Lihat sebagai contoh, Nicholas K. Tagliarino, 'The Status of National Legal Frameworks for Valuing Compensation for Expropriated Land: An Analysis of Whether National Laws in 50 Countries/Regions across Asia, Africa, and Latin America Comply with International Standards on Compensation Valuation', *Land* 6, no. 2 (June 2017): 37, <https://doi.org/10.3390/land6020037>; Celine Salcedo-La Viña and Laura Notess, 'A Fair Share For Women: Toward More Equitable Land Compensation and Resettlement in Tanzania and Mozambique', Working Paper (World Resources Institute, March 2018), <https://africa.wri.org/research/fair-share-women-toward-more-equitable-land-compensation-and-resettlement-tanzania-and>.

³⁶ Untuk penjelasan tentang bagaimana melakukan Latihan valuasi, lihat Rachael Knight, Jaron Vogelsang, and Marena Brinkhurst, 'Valuation of Community Lands and Natural Resources', in *Community Land Protection Facilitators Guide* (Namati, 2016), <https://grassrootsjusticenetwork.org/resources/chapter-valuation-of-community-lands-and-natural-resources/>.

³⁷ Rachael Knight et al., 'Are Community-Investor Conflicts Inevitable? Community Legal Empowerment and Conflict Prevention Experiences from Cameroon and Uganda' (London: IIED, 2025), <https://www.iied.org/22640iied>.

³⁸ Questions adapted from, Oxfam and IISD, *Enabling Voices, Demanding Rights: A Guide to Gender-Sensitive Community Engagement in Large-Scale Land-Based Investment in Agriculture*, 2017, 23, <https://policy-practice.oxfam.org/resources/enabling-voices-demanding-rights-a-guide-to-gender-sensitive-community-engagem-620474/>.

³⁹ Information from interview with anonymous gender expert January 2023.

⁴⁰ 'Self-Determination of the Afro-Descendant People of Nicaragua: Report by Nicaragua's Office for the Defense of Human Rights', Chicago ALBA Solidarity, 6 June 2023, <https://chicagoalbasolidarity.org/2023/06/06/self-determination-of-the-afro-descendant-people-of-nicaragua/>.

⁴¹ Libia Rosario Grueso Castelblanco, 'El Derecho de Las Comunidades Afrocolombianas a La Consulta Previa, Libre e Informada: Una Guía de Información y Reflexión Para Su Aplicación Desde La Perspectiva de Los Derechos Humanos', accessed 23 September 2025, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7653.pdf>; *Consulta previa para comunidades negras: Sentencia T-576 de 2014*, Derechos en el Territorio (Corte Constitucional 2014); Gloria Amparo Rodríguez, 'La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia', Grupo Semillas Colombia, 2008, <https://semillas.org.co/es/revista/la-consulta-previa-un-derecho-fundamental-de-los-pueblos-indigenas-y-grupos-tnicos-de-colombia>.